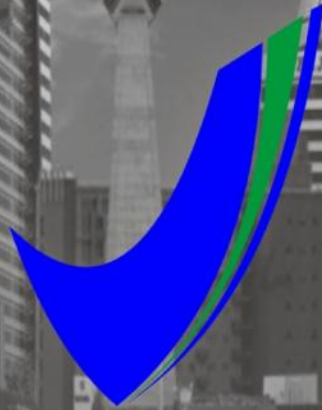


LAPORAN KINERJA 2018

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR



INSPECTION
CERTIFICATION

INVESTIGATION

INFORMATION & COMMUNICATION

LABORATORIUM

EDUCATION

LAPKIN
BALAI BESAR
POM
DI MAKASSAR
2018

KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar. Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2018. Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi BBPOM di Makassar dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja pada BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang. Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Makassar, Februari 2019

KEPALA,

Drs. Abdul Rahim. Apt. M.Si

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2018.

Berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 pada Bula September 2018, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Makassar tahun 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
6. Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Pencapaian sasaran strategis tahun 2018 diukur terhadap 15 indikator kinerja utama sesuai dengan hasil reuiu Rencana Strategis 2015-2019. 12 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian $\geq 90\%$ terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 3 indikator (Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya hanya berturut-turut 81,96 % ; 64,32%; dan 61,02 %

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Makassar pada tahun 2018 antara 61,02 % sampai dengan 180,05 %. Capaian indikator kinerja terendah pada “Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” sebesar 61,02%. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” sebesar 180,05. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi dari 12 kegiatan utama yang mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar kegiatan yang tidak efisien yaitu Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,01 sampai 1,81. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kotamadya mempunyai TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Makassar didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar Rp 57.553.452.000,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Kemudian terdapat perubahan pagu anggaran setelah adanya revisi DIPA pada output Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota dari 2 Kabupaten menjadi 1 Kabupaten dan selisih anggaran dialokasikan untuk Pembayaran tunjangan kinerja menjadi Rp 57.380.795.000,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 50.618.525.526,- (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 88,22%.

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA 2018
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

Penanggung jawab

Drs. Abdul Rahim Mahmuda, Apt, M. Si

Ketua

Drs. Ahmad Yani, Apt

wakil ketua

A. Amírah Nilawati, S.Si., Apt., M.HSM

Sekretaris

Sitti Hikma Suciati, S.Si., M. Si.

Anggota

Drs. Muh Ridwan, Apt

Atsuko Al-Amíny, S.Si., M.Si

Dra. Ina Tanujaya, Apt., M.Sc.

Dra. Hj. Conita Fitriani, Apt

Dra. Hj. Asnidar, Apt.M.Si

Dra. Hj. A. Aisyah Andi Hafid, Apt

Dra. Hj. Asnidar, Apt.M.Si

Muhammad Faísal, SH

Hartini Nur, SH., M. Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

1. Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Aspek Strategis	10
1.4. Isu Strategis	10

2. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	24
2.3. Kriteria Pencapaian Indikator	27

3. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja OTK Lama	29
3.2. Capaian Kinerja OTK Baru	55
3.2.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	57
3.2.2. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	132
3.2.3. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya	134
3.3. Realisasi Anggaran	143
3.4. Analisis Efisiensi Kegiatan	147

4. Penutup

4.1. Kesimpulan	
4.2. Saran	

Lampiran
Daftar Tabel
Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014	
Tugas Pokok	Fungsi
Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.	<ol style="list-style-type: none">Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapanik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOMPelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; danPelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018	
Tugas Pokok	Fungsi Peraturan BPOM
Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan; e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

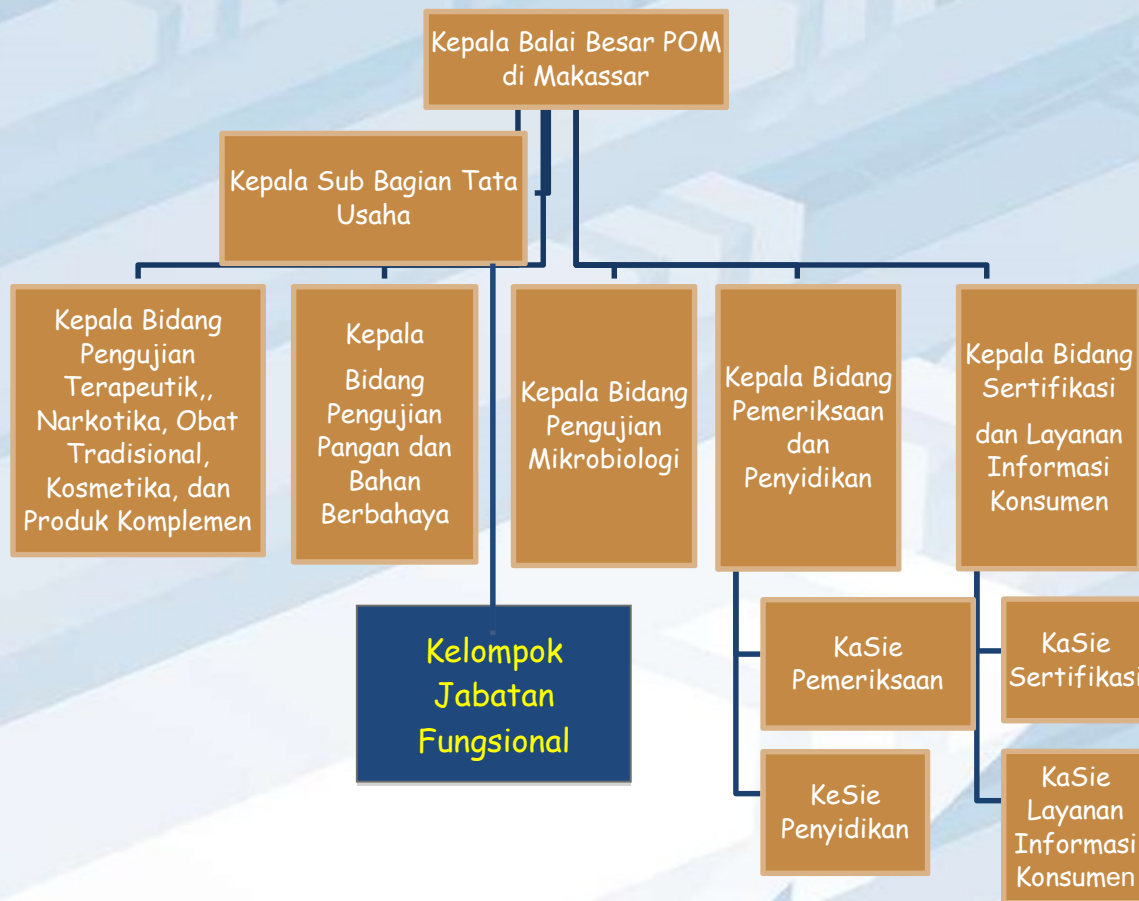
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Makassar yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu Balai Besar POM di Makassar selalu berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan mengalami perubahan dengan adanya Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014



Berdasarkan dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.1, secara garis besar unit-unit kerja Balai Besar POM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

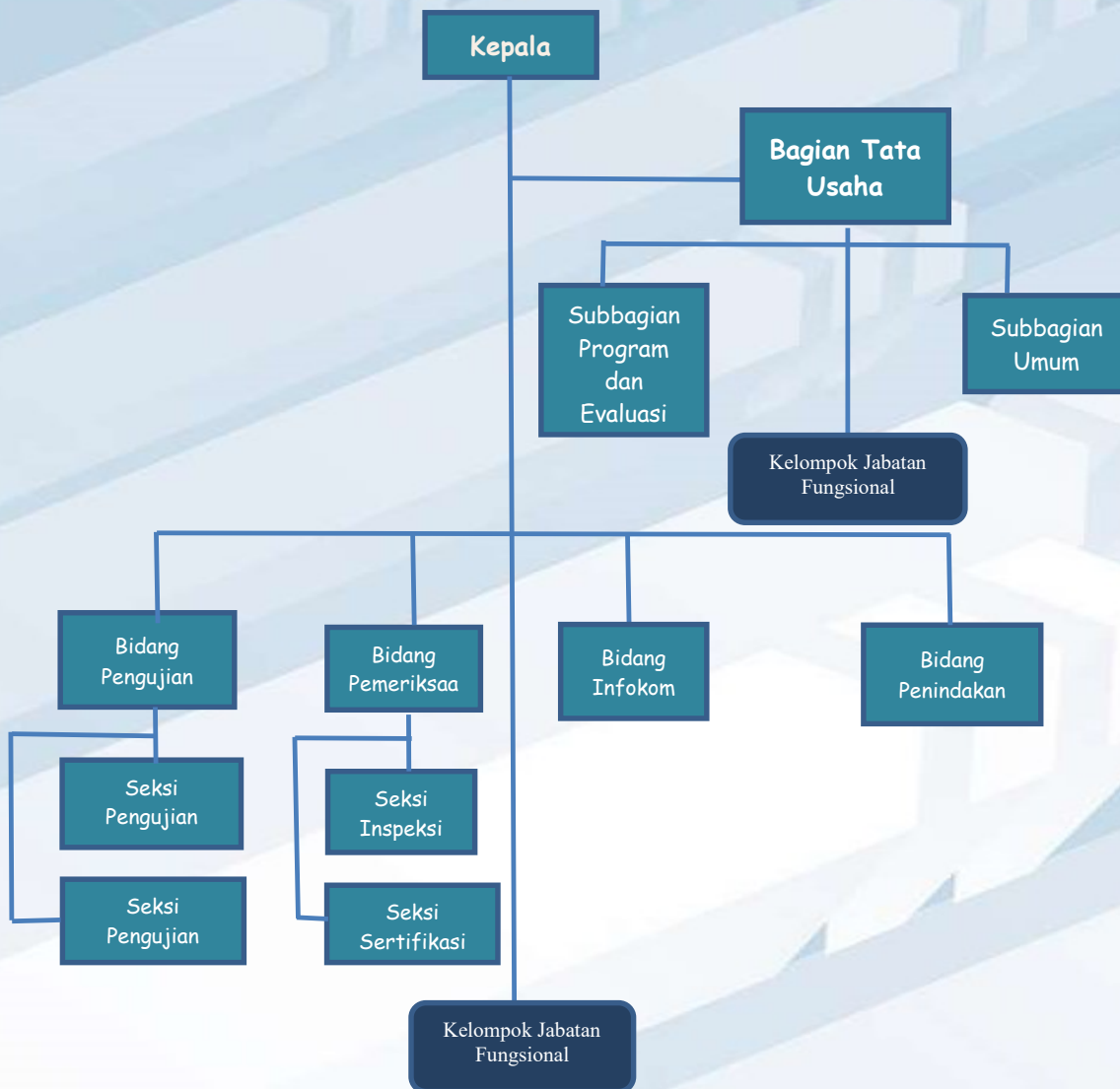
- **Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen
- **Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya
- **Bidang Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi
- **Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
- **Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.



Subbagian tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Makassar.

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2014

Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.



1. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

a. Seksi Pengujian Kimia

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

b. Seksi Pengujian Mikrobiologi

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;

4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi;
Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- b. Seksi Sertifikasi;
Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi;

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b. Subbagian Umum; dan

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 dibentuk 40 Loka POM di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Loka POM di Kota Palopo.



Tugas dan fungsi Loka POM sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian, yang membedakan adalah wilayah kerja. Cakupan pengawasan Loka POM Palopo yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Enrekang.

1.3 Aspek Strategis

- ❖ Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan berada di tengah – tengah kepulauan Indonesia, dengan Selat Makassar telah ditetapkan sebagai salah satu jalur pelayaran internasional, menjadikannya sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia yang tidak pernah sepi dari aktifitas perdagangan baik domestik maupun internasional. Kondisi ini menjadi poin penting peran Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus pengawasan Balai Besar POM di Makassar antara lain :
- ❖ Pusat perdagangan Obat dan Makanan di Wilayah Indonesia Timur
- ❖ Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Selatan berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik Tanpa Ijin Edar dan atau mengandung Bahan Berbahaya,
- ❖ Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar di Sulawesi Selatan
- ❖ Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao (berdasarkan Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan) jadi diperlukan pengawasan terhadap kontaminasi Bahan Berbahaya sebelum diolah dengan bersinergi dengan SKPD terkait.
- ❖ Terdapat beragam jenis kuliner di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar yang perlu diawasi keamanan, mutu produk pangan tersebut.
- ❖ Kompetensi Laboratorium BBPOM di Makassar sebagai Laboratorium unggulan untuk Pengujian Bioteknologi dan Laboratorium rujukan untuk pengujian Disolusi dan Bahan Tambahan Pangan untuk wilayah Indonesia Timur.

1.4 Isu Strategis

Pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Makassar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke wilayah Indonesia Timur termasuk di dalamnya adalah produk ilegal

2. Banyaknya pelabuhan kecil termasuk di border area yang tidak dapat dikawal secara intensif oleh BPOM di Makassar dan Bea Cukai
3. Semakin banyak produsen peracik rumahan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung Bahan Berbahaya (BB)
4. Maraknya penjualan obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan TIE/ilegal dan atau mengandung BB secara online
5. Rendahnya pengetahuan produsen peracik rumahan kosmetik TIE dan atau mengandung Bahan Berbahaya (BB)
6. Distribusi Obat tertentu disalurkan bukan oleh sarana yang berhak atau perorangan
7. Proses penarikan dan pemusnahan produk tersebut kemungkinan tidak tuntas
8. Belum sinerginya lintas sektor terkait dalam mengawasi produk obat dan makanan
9. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor di kalangan remaja dan masyarakat usia produktif
10. Penggunaan rokok elektrik semakin marak sementara belum ada aturan baku yang mengatur tentang peredaran rokok elektrik
11. Keterbatasan jumlah peralatan pengujian utama untuk melakukan uji rujuk dan uji absah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Palopo sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusia, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih optimal dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2015-2019 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2015-2019. Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sejalan dengan visi dan misi Badan POM.

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin dapat ditoleransi tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :



Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

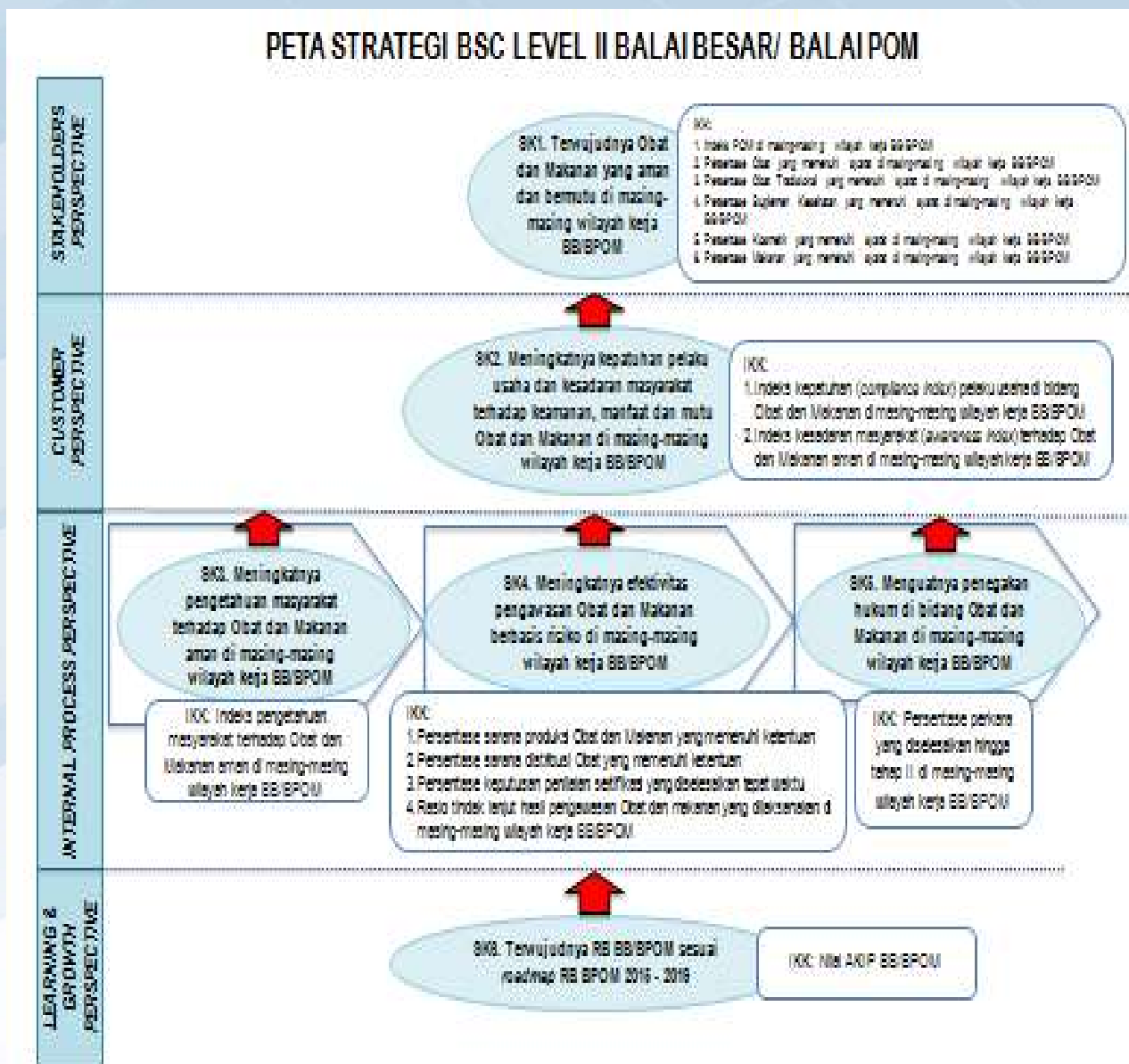
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka Balai Besar POM di Makassar perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*) dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan terpadu yang melibatkan instansi terkait pengawasan obat dan makanan baik pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan peta strategis tersebut, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun sasaran kegiatan dengan mempertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastuktur yang dimiliki. Sasaran kegiatan yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 2015-2019 yang mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2018 yang tercantum dalam Peta Strategis BSC level 0. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi sasaran kegiatan pada peta strategis Level II BBPOM di Makassar.

Gambar 2.1
Peta Strategis BSC Level II Balai Besar /Balai POM



SASARAN KEGIATAN 1



Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.
- Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di laboratorium guna memastikan Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 70%
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 93,5%.
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target 83 %
- d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target 92%
- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target 82 %
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 90 %

SASARAN KEGIATAN 2



Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulaidari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar dengan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :
Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target 60.

SASARAN KEGIATAN 3



Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pameran, penyebaran informasi, talkshow, Car free day, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan menumbuhkan sikap dan perilaku melindungi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target 60.

SASARAN KEGIATAN 4



Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risikodi wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan target 100 %
2. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 50 %
3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target 65 % Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 75 %
4. Ratio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan dengan target 38

SASARAN KEGIATAN 5



Menguatnya penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan di Balai Besar POM di Makassar menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial masyarakat. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dengan target 50%.

SASARAN KEGIATAN 6



Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Makassar sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Makassar berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Makassar akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian

nasional akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar, dengan target **78** pada akhir 2018.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2018 (Milyar)
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Pengawasan Obat dan Makanan ▪ Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat ▪ Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - ▪ 0,384 ▪ 0,337 ▪ 0,690 ▪ 0,123 ▪ 0,923
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan ▪ Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - ▪ -
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di wilayah kerja BBPOM di Makassar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar ▪ Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar ▪ Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar ▪ Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ▪ Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - ▪ 0,330 ▪ 2,397
<p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Makassar</p>	<p>Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar</p>	<p>Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Makassar sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019</p>	<p>Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II</p> <p>Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar</p>

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator output, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan pagu anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Makassar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran antara lain : output, komponen input, jenis belanja dan kelompok belanja.

Hal lain yang masih harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar dalam rangka pencapaian strategi organisasi dan peningkatan kinerja adalah penyusunan kontrak kinerja individu sampai dengan pelaksana berdasarkan tugas fungsi serta IKU yang cascade dari atasan. Kontrak kinerja untuk level organisasi di mulai sejak tahun 2015, sedangkan kontrak kinerja untuk semua pegawai BBPOM di Makassar dimulai pada tahun 2014 hanya pada tataran pada tugas fungsi namun belum sesuai dengan IKU level unit organisasi atau IKU yang cascade.

Penyusunan dokumen Renja oleh Badan POM, RKA oleh BBPOM di Makassar dan kontrak kerja telah melalui tahapan konsultasi dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Sinergitas yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen .

2.2.2 Perjanjian Kinerja OTKLama Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai Besar POM di Makassar sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

2.2.3 Perjanjian Kinerja OTKBaru Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 (dapat dilihat pada lampiran 2). Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	93,5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	83
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	82
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	90
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan	75
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	38
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	78

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar : Rp. 57.553.452.000,-

Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (OTK Lama)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4307
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15.3
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31.68
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10
7	Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan public BB/BPOM	820
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	24

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar : **Rp. 57.553.452.000,-**

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus di bawah.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus di bawah.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Kriteria penilaian Capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

3. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Makassar merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya

3.1. Capaian Kinerja OTK Lama

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja SOTK Lama. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018 telah tercapai.

Dari 8 indikator untuk 3 sasaran, 7 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian $\geq 90\%$ terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator (Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya hanya 81,96 %

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
RENJA 2018 (OTK Lama)					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4307	3530	81,96
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15,3	18,23	119
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,68	33,14	104,61
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14	14	100
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86	84,17	97,87
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	820	855	104,27
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	24	24	100

Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

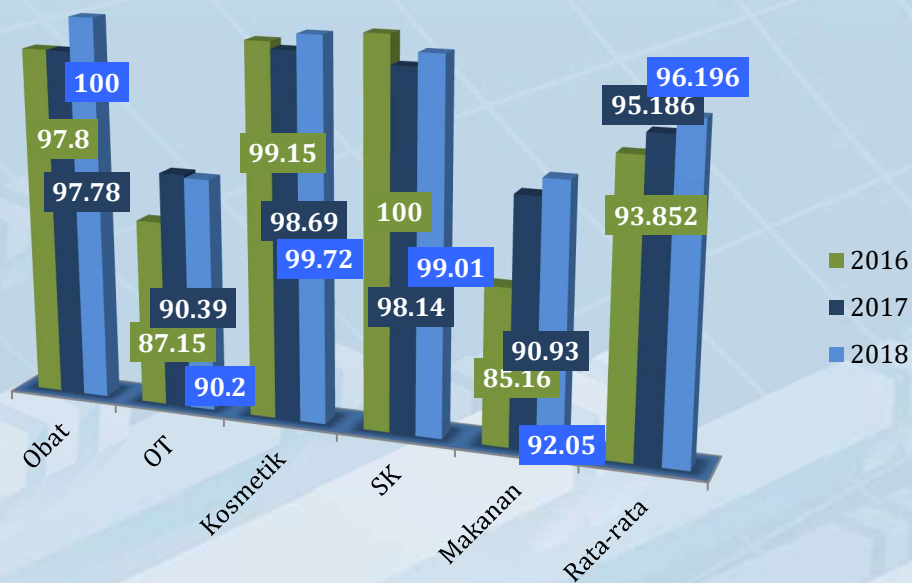
Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 1 (SS1) didasarkan pada penilaian terhadap indikator kinerja yang juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Balai Besar POM di Makassar

SS 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 3.2. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja tahun 2016-2018

Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Realisasi 2016 (%)	Capaian 2016 (%)	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)	Capaian 2017 (%)	Target 2018 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian 2018 (%)
Persentase obat yang Memenuhi Syarat	92,5	97,8	105,73	95	97,78	102,92	97,8	100	102,25
Persentase obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	81	87,15	107,59	85,00	90,39	106,34	91	90,2	99,12
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	90	99,15	110,17	95	98,69	103,88	98	99,72	101,76
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	80	100	125	95	98,14	103,3	98	99,01	101,03
Persentase makanan yang Memenuhi Syarat	80	85,16	106,45	89,00	90,93	102,17	89	92,05	103,43
Rata-rata			110,99 Memuaskan			103,72 Memuaskan			101,52 Memuaskan

Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2016, 2017, dan 2018



Sasaran strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dengan 5 indikator kinerja. Capaian persentase 5 indikator rata-rata memuaskan kecuali capaian Persentase Obat tradisional pada tahun 2018 kategori cukup berdasarkan hasil uji yang memenuhi syarat terhadap total sampel yang selesai uji. Pencapaian ini belum utuh menggambarkan kondisi nyata indikator kinerja persentase produk Obat tradisional yang memenuhi syarat karena masih ada sampel OT di posisi *carry over* di tahun 2018. Hal ini terjadi disebabkan kendala adanya renovasi Laboratorium, beberapa alat rusak dan kurangnya tenaga penguji.

Tabel 3.3. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1, tahun 2018

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target 2018</i>	<i>Realisasi 2018</i>	<i>Capaian 2018</i>
<i>Persentase obat yang Memenuhi Syarat</i>	97,8	100	102,25
<i>Persentase obat Tradisional yang Memenuhi Syarat</i>	91	90,2	99,12
<i>Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat</i>	98	99,72	101,76
<i>Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat</i>	98	99,01	101,03
<i>Persentase makanan yang Memenuhi Syarat</i>	89,00	92,05	103,43
<i>Rata-rata Capaian</i>			101,518

Dari pencapaian 5 target indikator yang merupakan IKU pada sasaran strategis 1, maka nilai pencapaian sasaran (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikali dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NP1 + NP2 + NP3 + NP4 + NP5}{5}$$

$$NPS = \frac{102,25 + 99,12 + 101,76 + 101,03 + 103,43}{5}$$

$$NPS = 101,518$$

1. *Persentase Obat yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 100 %, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

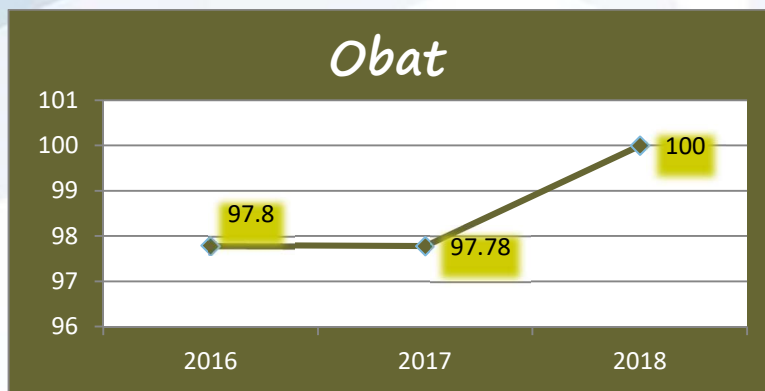
$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Produk Obat MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat}} \times 100 \%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 102,25% dengan realisasi sebesar 100 % obat yang beredar di Sulawesi selatan telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 585 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 585 sampel. Jenis obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat program pemerintah, obat untuk pengobatan spesifik, obat yang diproduksi dalam jumlah besar dan banyak beredar, obat yang memiliki riwayat TMS (tidak memenuhi syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yg memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor dan vaksin impor, Narkotik, Psikotropik/Prekursor.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2108 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 terjadi kenaikan dari 97,78 % menjadi 100 %. Namun, realisasi tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2016.

Gambar 3.2

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, dan 2018



2. *Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat*

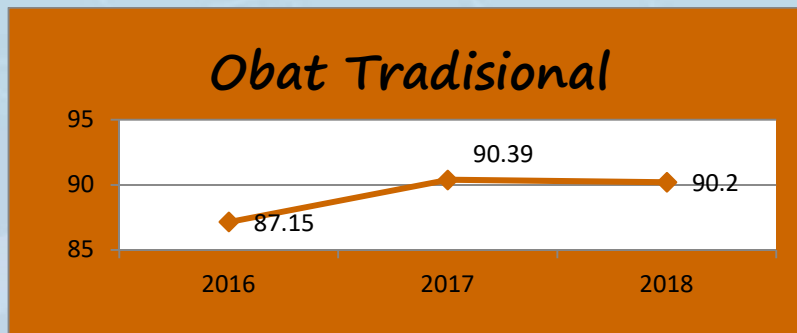
Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 100 %, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase OT MS} = \frac{\text{Produk OT MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Obat Tradisional}} \times 100 \%$$

Capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 99,12 % dengan realisasi sebesar 90,20 % obat Tradisional yang beredar di Sulawesi selatan telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat Tradisional yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 525 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat tradisional yang disampling di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 582 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat tradisional yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat tradisional impor, obat tradisional stamina, obat tradisional pelangsing, obat tradisional pegel linu, obat tradisional nafsu makan, obat kuasi, produk UKOT/UMOT, MLM, dan obat tradisional yang dijual online.

Realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2108 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 terjadi penurunan dari 90,20 % menjadi 90 %. Namun, realisasi tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016.

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, dan 2018



3. *Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat*

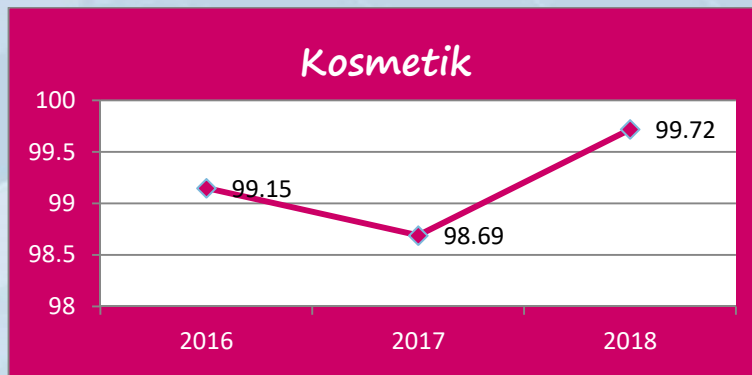
Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan Kosmetik. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 99,72%, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kos MS} = \frac{\text{Produk Kosmetik MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Kosmetik}} \times 100 \%$$

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 101,76 % dengan realisasi sebesar 99,72 % kosmetik yang beredar di Sulawesi selatan telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 1073 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetik yang disampling di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1076 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk kosmetika yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut, rambut, sediaan mandi dan mandi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, Multi Level Marketing (MLM), dan media on-line.

Realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2108 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 terjadi kenaikan dari 98,69 % menjadi 99,72 %. Namun, realisasi tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2016.

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, dan 2018



4. *Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan Suplemen Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 99,01%, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

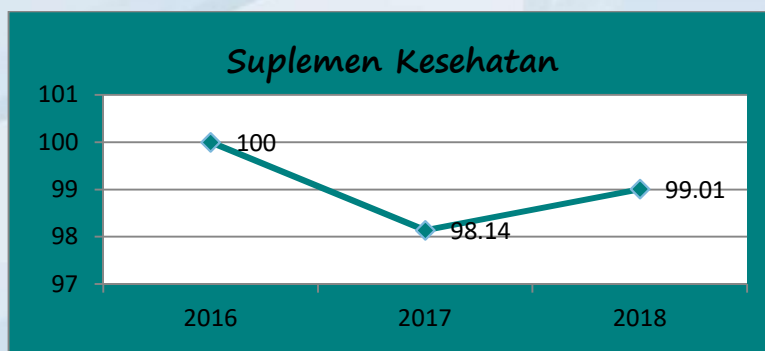
$$\text{Persentase SKMS} = \frac{\text{Produk SK MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Suplemen Kesehatan}} \times 100 \%$$

Capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 101,03 % dengan realisasi sebesar 99,01 % kosmetik yang beredar di Sulawesi selatan telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 202 sampel

dibandingkan terhadap jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 204 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah adalah produk suplemen kesehatan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi suplemen untuk stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor.

Realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 terjadi kenaikan dari 98,14 % menjadi 99,01 %. Namun, realisasi tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2016

Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, dan 2018



5. *Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat*

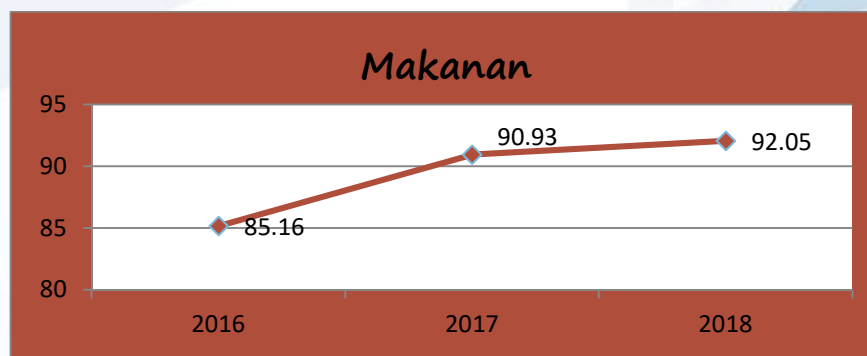
Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 92,05%, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PersentaseMakananMS} = \frac{\text{Produk Makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Suplemen Kesehatan}} \times 100$$

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 103,43 % dengan realisasi sebesar 92,05 % makanan yang beredar di Sulawesi selatan telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 997 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel makanan yang disampling di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1083 sampel. Jenis makanan yang disampling sesuai kategori pada Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk makanan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; sereal; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur dan produk olahannya; pemanis, madu; garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap pangan campuran (komposit); makanan spesifik daerah, pangan jajanan anak sekolah, pangan DNA dan kemasan pangan.

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 terjadi kenaikan dari 90,93 % menjadi 92,05 %. Hal yang sama, realisasi tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016.

Gambar 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja persentaseMakanan yang memenuhi syarat tahun 2016, 2017, dan 2018



Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar

Indikator : 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Realisasi jumlah sampel yang diuji pada tahun 2018 sebesar 3530 sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan dari 4307 Sampel yang masuk dengan capaian 81,96 % .

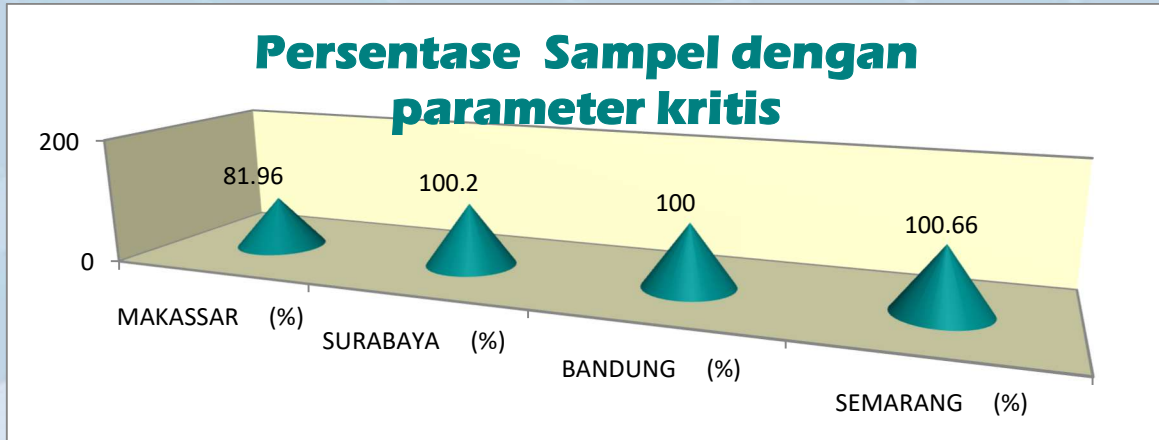
Perbandingan capaian realisasi indikator Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis di Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan capaian realisasi indikator Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	81,96	100,20	100	100,66

Gambar 3.7

Perbandingan capaian realisasi indikator Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja persentase sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pencapaian BBPOM di Makassar lebih rendah kriteria cukup dibandingkan dengan capaian 3 Balai Besar POM Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, yaitu diatas 100% (memuaskan)

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Indikator Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi tahun 2018 sebesar 31,79 % dengan capaian target sebesar 100,32 %, dibandingkan dengan capaian Realisasi tahun 2017 dan 2016 masing-masing 132,16 % dan 152 % termasuk kategori tidak dapat disimpulkan.

Pengawasan sarana produksi obat dan makanan dilaksanakan di sarana industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP).

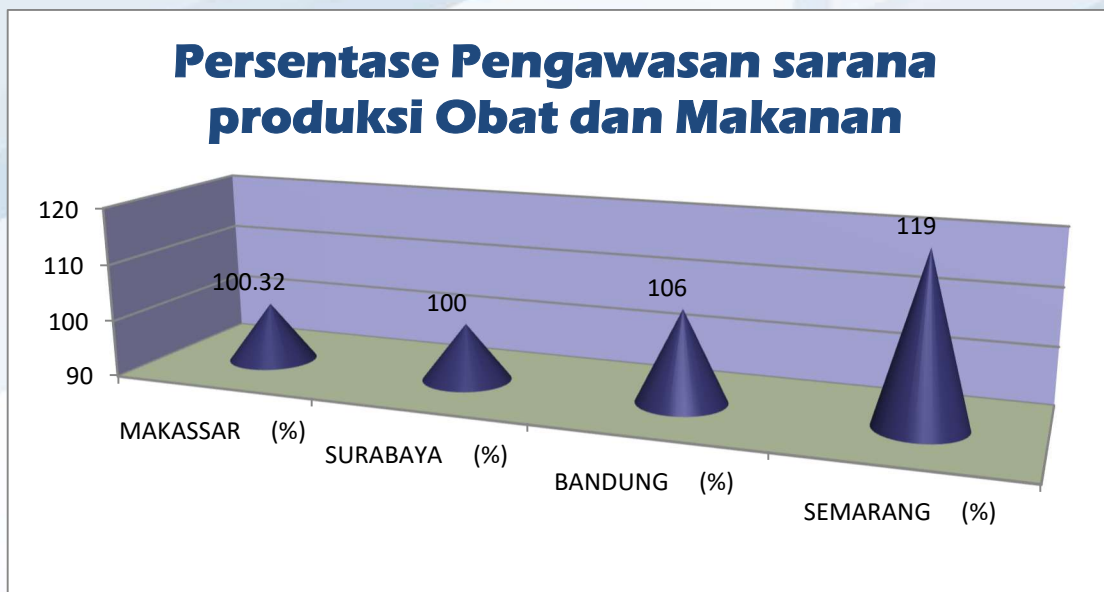
Perbandingan capaian realisasi Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,32	100	106	119

Gambar 3.8.

Perbandingan capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dibandingkan dengan capaian 3 Balai Besar POM Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, yaitu diatas 100% (memuaskan)

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Indikator: Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2018 sebesar 33,14 % dengan capaian target sebesar 104,58 %, dibandingkan dengan capaian Realisasi tahun 2017 dan 2016 masing-masing 128,23 % dan 113,06 %. Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan capaian tahun 2016 relatif sama dengan capaian tahun 2018 dengan kriteria memuaskan.

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dilaksanakan di sarana distribusi obat, Narkotika, Psikotropika dan prekursor, obat tradisional, kosmetika, pangan, dan bahan berbahaya.

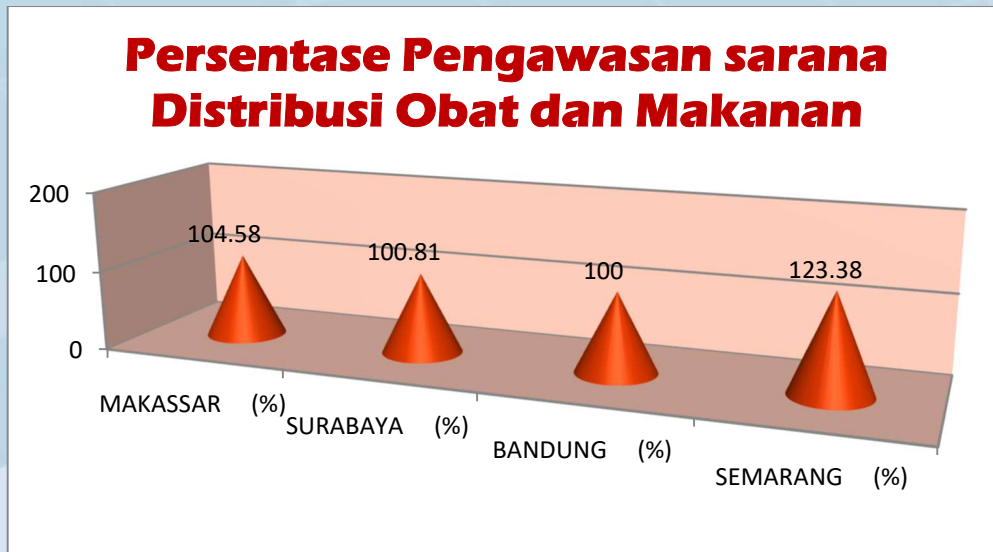
Perbandingan realisasi Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.6.Perbandingan capaian Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	104,58	100,81	100	123,38

Gambar 3.9.

Perbandingan capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator Persentase Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM Surabaya, dan BBPOM di Bandung yaitu diatas 100% (memuaskan), sedangkan BBPOM di Semarang capaiannya 123,38 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator: Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Realisasi Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan tahun 2018 sebesar 14 dengan capaian target sebesar 100 %, sama dengan capaian Realisasi tahun 2017 dan 2016 yaitu 100 % dengan kriteria memuaskan.

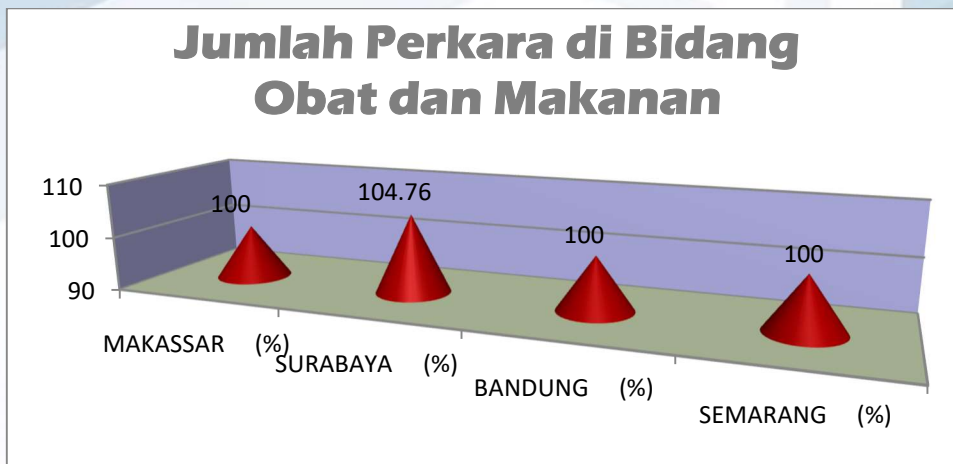
Jumlah perkara adalah Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS

Perbandingan realisasi jumlah perkara BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan capaian Persentase Jumlah perkara di Bidang Obat dan Makanan di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	100	104,76	100	100

Gambar 3.10.. Perbandingan capaian Persentase Jumlah perkara di Bidang Obat dan Makanan di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dibandingkan dengan capaian 3 Balai Besar POM Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, yaitu diatas 100% (memuaskan)

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

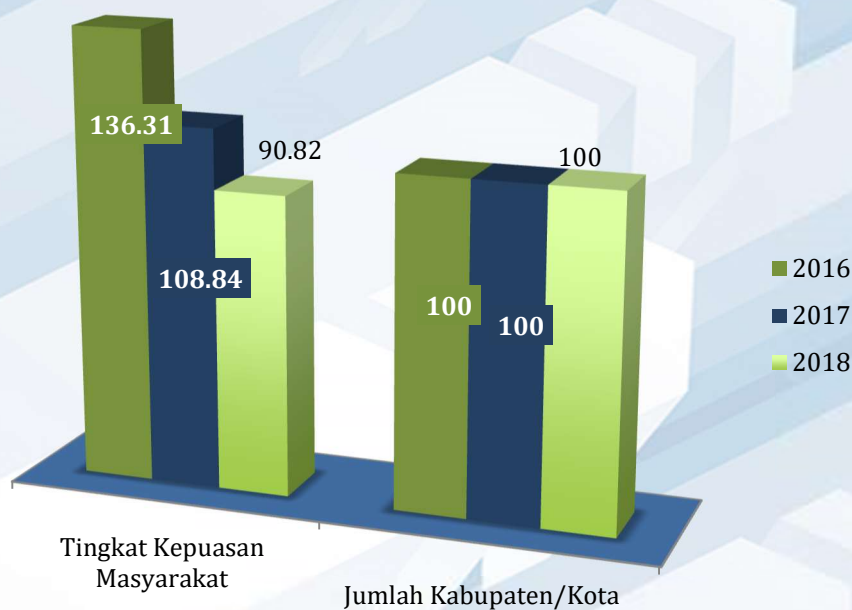
Pada Sasaran Strategis 2, terdapat dua indikator dimana salah satu indikator yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan gambaran tentang kinerja pelayanan publik BBPOM di Makassar. Survei ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan.

Sedangkan Indikator kinerja sasaran strategis 2 lainnya adalah wujud dari hasil kegiatan advokasi dan tata hubungan kerja berupa koordinasi dan sinergisme membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.8. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2, tahun 2018

SS2 Meningkatkan kemendrian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Kepuasan Masyarakat	85	77,19	90,82	Cukup
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	5	100	

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2016, 2017, dan 2018



Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan IKU pada sasaran strategis 2, maka nilai pencapaian sasaran (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikali dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NP1 + NP2}{2}$$

$$NPS = \frac{90,82 + 100}{2}$$

$$NPS = 95,41$$

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Indikator:

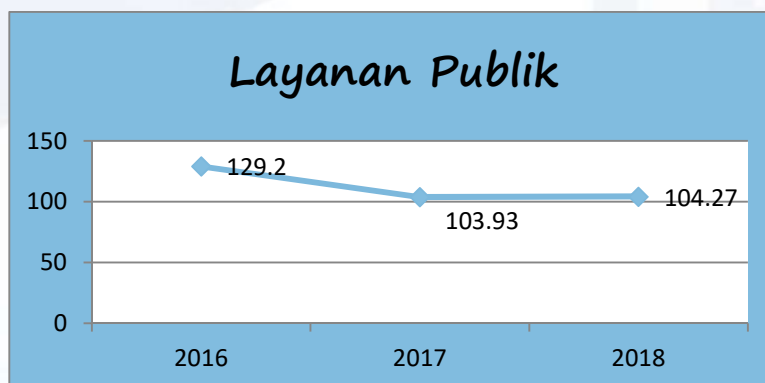
1. Jumlah Layanan Publik

Realisasi jumlah layanan publik BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 855 layanan terdiri dari layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), layanan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Penyuluhan kepada masyarakat, layanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)

Capaian realisasi persentase jumlah layanan publik tahun 2018 sebesar 104,27%, capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 dan terjadi penurunan dari 129,20% di tahun 2016 menjadi 103,93% pada tahun 2017.

Gambar 3.12

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja persentase Jumlah layanan publik tahun 2016, 2017, dan 2018



Beberapa hal yang menjadi pendukung kenaikan realisasi adalah :

1. Meningkatnya permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), berturut-turut sebesar 14% dan 25%.
2. Meningkatnya Tindak lanjut hasil pengaduan, dimana capaian variabel ini sulit untuk dirediksi.

2. Komunitas yang diberdayakan

Komunitas yang diberdayakan adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan.

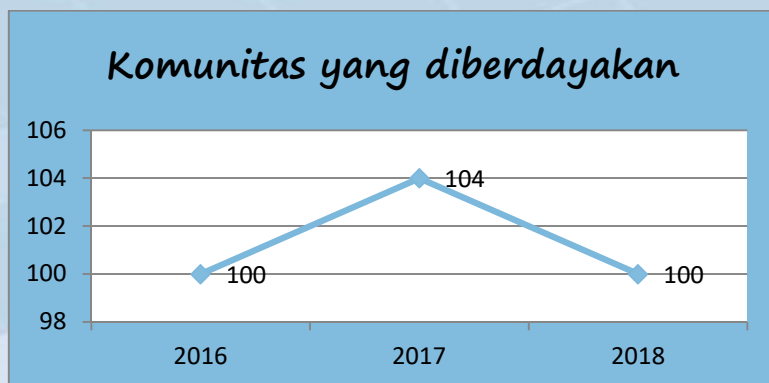
Target kegiatan ini adalah 23 komunitas, dan terealisasi 104% (24 komunitas). Adapun komunitas yang diberdayakan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Jenis komunitas yang diberdayakan

No.	Nama Komunitas	Lokasi
1.	Kelurahan Sambung Jawa	Kota Makassar
2.	Desa Banggae	Kabupaten Takalar
3.	Desa Tope Jawa	Kabupaten Takalar
4.	Kelurahan Cambayya	Kota Makassar
5.	Desa Marioraja	Kabupaten Soppeng
6.	Desa Gattareng Toa	Kabupaten Soppeng
7.	Kelurahan Tammua	Kota Makassar
8.	Desa Watu	Kabupaten Bone
9.	Desa Parippung	Kabupaten Bone
10.	Kelurahan Kunjung Mae	Kota Makassar
11.	Kelurahan Loka	Kabupaten Bulukumba
12.	Kelurahan Caile	Kabupaten Bulukumba
13.	Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar	Kota Makassar
14.	Pasar Pattallassang	Kabupaten Takalar
15.	Pasar Karisa	Kabupaten Jeneponto
16.	Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng	Kabupaten Bantaeng
17.	Pasar Erasa	Kabupaten Pangkep
18.	Pasar Awangpone	Kabupaten Bone
19.	Komunitas sekolah di Kota Makassar (2014)	Kota Makassar
20.	Komunitas sekolah di Kota Makassar (2015)	Kota Makassar
21.	Komunitas Sekolah di Kabupaten Takalar (2016)	Kabupaten Takalar
22.	Komunitas Sekolah di Kabupaten Gowa (2017)	Kabupaten Gowa
23.	Komunitas Penyuluh Keamanan Pangan PIRT	
24.	Komunitas PKP Garam Fortifikasi Daerah	

Capaian realisasi persentase Komunitas yang di berdayakan tahun 2018 sebesar 100 % , capaian ini mengalami penurunan dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 dan terjadi peningkatan dari 100% di tahun 2016 menjadi 104 %. Pada tahun 2017 .

Gambar 3.13
Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja persentase Komunitas yang diberdayakan tahun 2016, 2017, dan 2018



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Tabel 3.10. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3, tahun 2018

SS.3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar oleh Badan POM	80 (A)	73,77 (BB)	94,58	Cukup

Pengukuran terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar dari Badan POM, dengan kategori hasil penilaian SAKIP sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Kriteria Penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90	AA	Sangat memuaskan
> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
> 60 s.d. 70	B	Baik
> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
< 30	D	Kurang

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar Tahun 2016 , 2017 dan 2018 serta target2019

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019
Nilai SAKIP Balai Besar POM di Makassar oleh Badan POM	69,41 (B)	70,27(BB)	73,77 (BB)	80 (A)

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2018 adalah 73,77 atau BB yang artinya sangat baik. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,5 .poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

1. penggunaan aplikasi e-performance dan aplikasi Monev Bappenas untuk meng-input data kinerja setiap triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan.
2. konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan keberhasilan BBPOM di Makassar mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit Surveilans oleh TUV SUD pada tahun 2018

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 3, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) yaitu 94,58 %

Tabel 3.13. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3, tahun 2018

SS3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM				
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	86%	84,17%	97,87
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

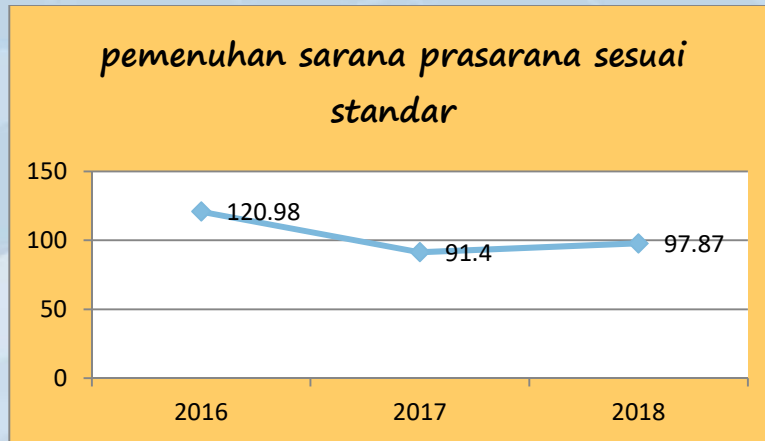
Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan
Indikator: Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Realisasi presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 94,17 dengan presentase capaian sebesar 97,87 %
 Perhitungan indikator ini berdasarkan pada presentase pemenuhan sarana prasarana dan presentase pemenuhan alat laboratorium sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 20 tahun 2015 dan standar minimum peralatan laboratorium UPT di lingkungan Badan POM yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan POM RI nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tahun 2014.

Capaian realisasi presentase sarana prasarana sesuai standar BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar tahun 2018 sebesar 97,87 % , capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan terhadap realisasi tahun 2017 dan terjadi penurunan dari 120,98% di tahun 2016 menjadi 91,40 %. Pada tahun 2017 .

Gambar 3.14

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tahun 2016, 2017, dan 2018



Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 10 Dokumen dengan persentase capaian sebesar 100 %.

Capaian realisasi persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu BBPOM di Makassar tahun 2018 sebesar 100 %, capaian ini sama dengan capaian tahun 2016 dan 2017 .

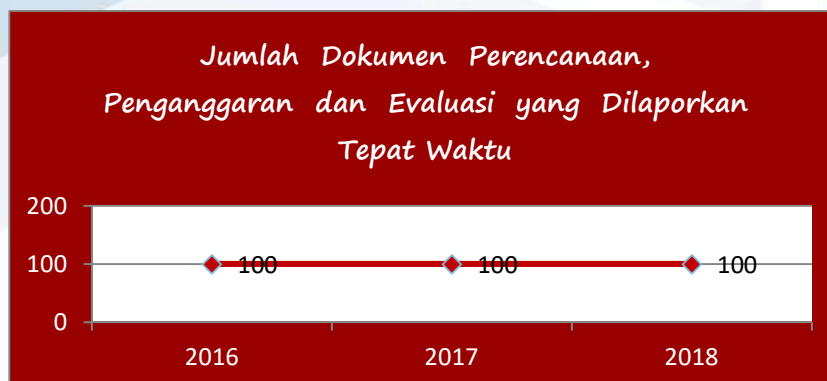
Dokumen yang harus dilaporkan tepat waktu pada tahun 2018 meliputi :

Tabel 3.14. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu BBPOM di Makassar , tahun 2018

No	Jenis Dokumen	Batas Waktu Pelaporan	Waktu Pelaporan
1	Pejanjian Kinerja Tahun 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018
2	Laporan Kinerja Tahun 2017	15 Februari 2018	15 Februari 2018
3	Laporan Tahunan Tahun 2017	15 Februari 2018	15 Februari 2018
4	Laporan Triwulan I	5 April 2018	5 April 2018
5	Laporan Triwulan II	5 Juli 2018	5 Juli 2018
6	Laporan Triwulan III	5 Oktober 2018	5 Oktober 2018
7	Laporan Keuangan Tahun 2017	8 Januari 2018	8 Januari 2018
8	Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018	9 Juli 2018	9 Juli 2018
9	Reviu Renstra Tahun 2015-2019	30 Oktober 2018	30 Oktober 2018
10	RKAKL/DIPA Tahun 2019	5 Desember 2018	5 Desember 2018

Gambar 3.15

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu tahun 2016, 2017, dan 2018



3.2. Capaian Kinerja OTK Baru

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018 telah tercapai.

Dari 15 indikator untuk 6 sasaran, 12 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian $\geq 90\%$ terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 3 indikator (Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya hanya berturut-turut 81,96 % ; 64,32%; dan 61,02 %

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15. Perbandingan target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

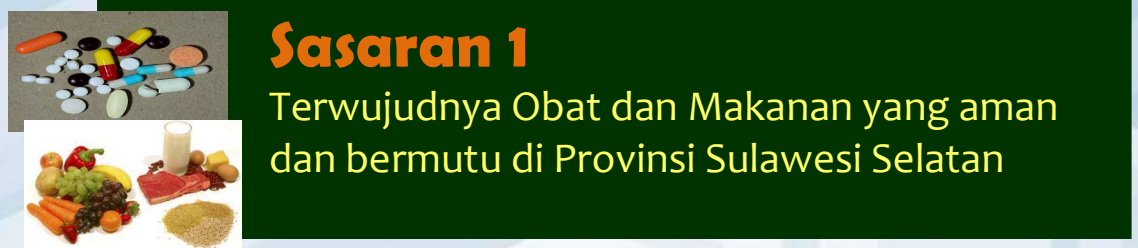
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Target 2019	
PETA STRATEGI (OTK Baru)						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	70	72,8	104,00	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	93,5	100,00	106,95	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	83	90,20	108,67	65,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	92	99,72	108,39	80,00

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Target 2019	
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	82	99,01	120,74	87,00	
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	90	92,05	102,28	72,00	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60	59,23	98,72	61
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60	69,26	115,43	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan	100	81,96	81,96	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50	32,16	64,32	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	65	39,66	61,02	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan	75	86,30	115,07	83,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	38	68,42	180,05	50,00

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Target 2019
5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50	64,28	128,56	50,00
6 Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB B POM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	78	73,77	94,58	81

3.2.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan ditandai diukur dengan 6 Indikator sebagai berikut :

1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	2 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan
3 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	4 Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan
5 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	6 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Target 70 Realisasi 72,80 Capaian 104,00%

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 93,5 Realisasi 100 Capaian 106,95%

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 83 Realisasi 90,20 Capaian 108,67%

Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 92 Realisasi 99,72 Capaian 108,39%

Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 82 Realisasi 99,01 Capaian 120,74%

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 90 Realisasi 92,05 Capaian 102,28%

Pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Sulawesi Selatan” dengan 6 indikator tersebut seluruh indikator mencapai target.

Pencapaian yang tinggi ini belum mencerminkan kondisi peredaran obat dan makanan yang sebenarnya, karena dasar perhitungan indikator pada sasaran strategis pertama adalah jumlah sampel obat dan makanan yang memenuhi syarat keamanan yang mempunyai nomor ijin pendaftaran dari Badan POM. Sedangkan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat tidak hanya produk yang terdaftar saja, masih terdapat produk yang tidak terdaftar/ilegal, industri kecil Obat Tradisional, industri mikro

obat tradisional yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) dan Industri Rumah Tangga produk industri pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan yang ilegal mengandung bahan berbahaya . Oleh karena itu perlu adanya reviu indikator pada sasaran strategis pertama.



1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar menggambarkan suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dimensi Pemerintah

1. Jumlah sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang diuji menggunakan parameter kritis
 2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)
 3. Persentase Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang memenuhi syarat
 4. Persentase sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang diawasi (Cakupan)
 5. Persentase Sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang memenuhi ketentuan
 6. Persentase sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang diawasi (Cakupan)
- Persentase rekomendasi tindak lanjut Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang dilakukan oleh Pemda

Dimensi Pelaku Usaha

- a. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya
- b. Jumlah UMKM obat tradisional yang diintervensi
- c. Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
- d. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan
- e. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan
- f. Persentase rekomendasi tindaklanjut Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan yang dilakukan oleh Pemda

Dimensi Masyarakat

Mencakup variabel yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan intervensi yang dilakukan BPOM terhadap masyarakat seperti pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan. Dimensi ini juga dapat mencakup peran aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil pengolahan data dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks, Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 sehingga nilai capaian yang tercantum di tabel merupakan nilai capaian IPOM pada tahun 2017

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	70	72,80	104	Memuaskan

Capaian indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2018 adalah sebesar 72,80. Hal ini merupakan capaian yang diukur berdasarkan variabel-variabel pembentuk terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM baik sendiri maupun yang terkait dengan instansi pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan kontribusi/peran dari pelaku usaha. Persentase capaian yang diperoleh adalah 104,00 % dengan kriteria **Memuaskan**

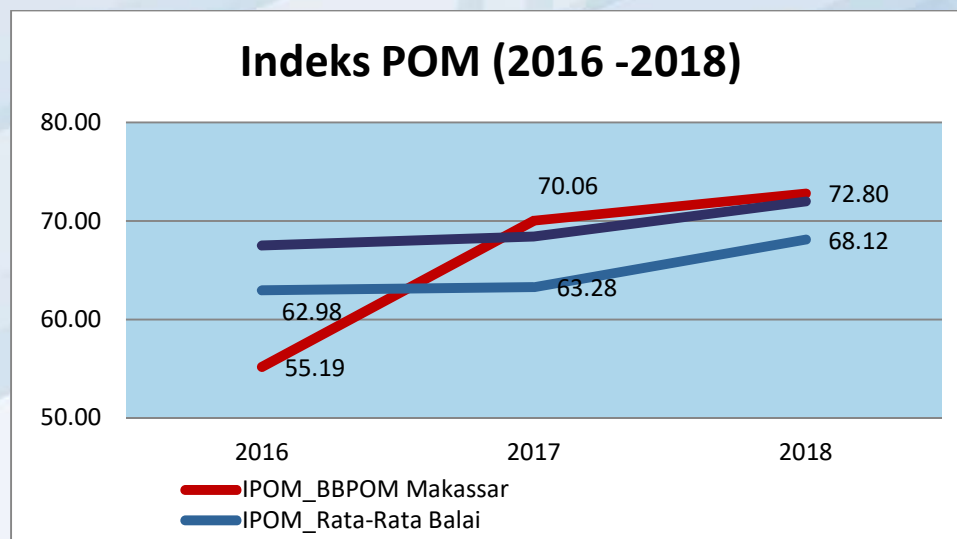
Tabel 3.17 Perbandingan Indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan rata-rata Balai dan Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018

Indeks POM	2015	2106	2017
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	55,19	70,06	72,80
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Rata-rata Balai	62,98	63,28	68,12
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Nasional	67,52	68,43	72,00

Hasil Capaian indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan. Hal ini tergambar pada hasil perhitungan menggunakan analisis AHP yang dilaksanakan oleh Badan POM dengan nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar adalah sebesar 72,80 atau meningkat 2,74 poin dari indeks tahun 2017 adalah sebesar 70,06 dan meningkat 14,87 poin dari nilai indeks tahun 2016. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2017-2018 berada diatas Indeks Pengawasan Obat dan Makanan rata-rata Balai dan Indeks POM Nasional. Dengan kata lain dapat disimpulkan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar mengalami trend meningkat selama 3 tahun terakhir (2016-2018). Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut :

Gambar 3.16

Perbandingan Indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan rata-rata Balai dan Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018



Hal utama yang mempengaruhi capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori baik dengan nilai 104 % atau mengalami kenaikan sebanyak 2,74 poin berasal dari peningkatan komponen pembentuk pada indeks

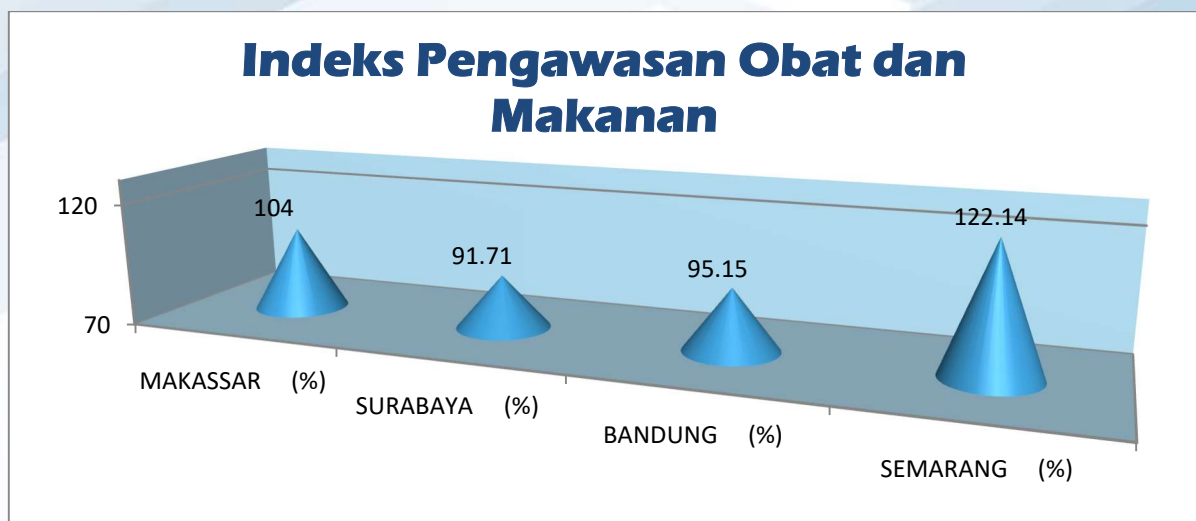
pengawasan obat dan Makanan komoditi kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk wilayah kerja BBPOM di Makassar

Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.18. Perbandingan capaian kinerja Indeks pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	104	91,71	95,15	122,14

Gambar 3.17. Perbandingan capaian kinerja Indeks pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, capaian BBPOM di Makassar dan BBPOM di Bandung Relatif sama Kategori memuaskan namun capaian Balai Besar POM di Surabaya dan BBPOM di Bandung dibawah 100% (cukup).

Capaian realisasi nilai indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 72,80 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka Target Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar di Tahun 2019 meningkat dari 70 menjadi 71, diharapkan tahun 2019 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar mengalami kenaikan dengan cara mendorong peningkatan komponen pembentuk pada indeks pengawasan obat dan makanan terutama pada pencapaian indeks pom komoditi obat dan pangan untuk wilayah kerja BBPOM di Makassar, yaitu :

- Nilai Indeks komponen pembentuk komoditi obat di wilayah kerja BBPOM Makassar adalah 70,02 dengan range IPOM 73,09 – 82,86
- Nilai Indeks komponen pembentuk komoditi Pangan di wilayah kerja BBPOM Makassar adalah 64,01 dengan range IPOM 80,95 – 96,06

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan persentase seluruh obat yang disampling dan diuji dikurangi dengan persentase obat yang tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan



Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan telah tercapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 100 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Produk Obat MS yang diuji dengan Parameter Kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat yang diuji}} \times 100 \%$$

Tabel 3.19.

Capaian kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	93,5	100	106,95	Memuaskan

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 106,95 % dengan realisasi sebesar 100 % obat yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan produk obat MS yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 585 sampel terhadap sampel obat yang diuji sebanyak 585 sampel. Jenis obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2018 yaitu kategori obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat program pemerintah, obat untuk pengobatan spesifik, obat yang diproduksi dalam jumlah besar dan banyak beredar, obat yang memiliki riwayat TMS (tidak memenuhi syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang

memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor dan vaksin impor, Narkotik, Psikotropik/Prekursor.

Jumlah keseluruhan sampel adalah 760 sampel, dan hanya 585 sampel yang selesai uji, dimana 4 sampel vaksin di uji di PPOMN dan 4 sampel rokok di uji di BBPOM Surabaya, dan sisanya sebanyak 167 sampel obat yang carry over di tahun 2019.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori memuaskan antara lain :

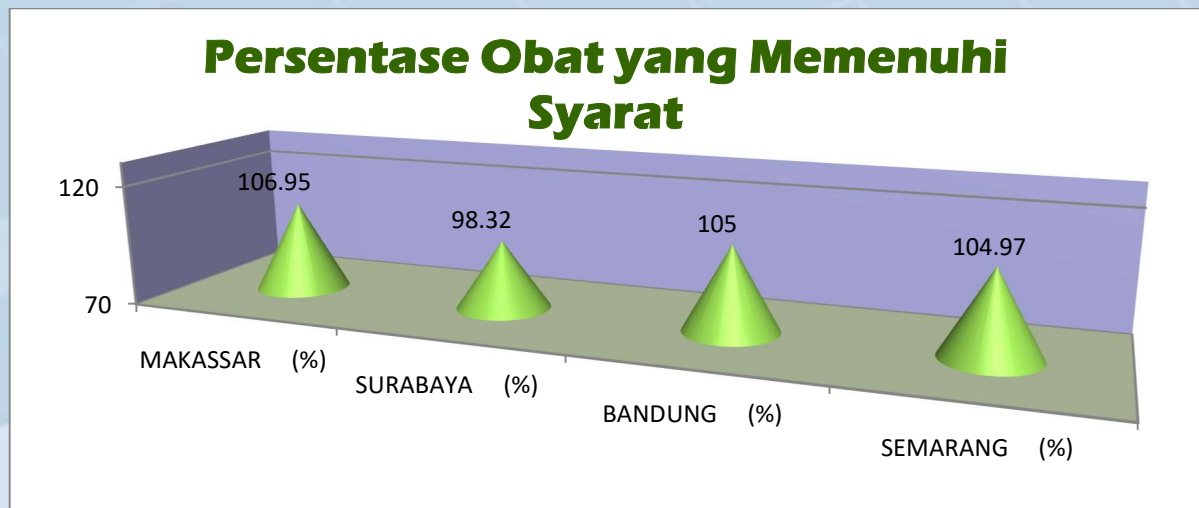
- Kategori sampling untuk sampel obat yang diuji adalah yang telah memiliki nomor izin edar sehingga hasil pengujian masuk dalam kategori memenuhi syarat, dimana penilaian terhadap obat yang telah memiliki izin edar telah diawasi melalui premarket dan post market produk obat
- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.

Perbandingan realisasi indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.20. Perbandingan capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	106,95	98,32	105	104,97

Gambar 3.18. Perbandingan capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja pertama, pencapaian BBPOM di Makassar realif sama dengan BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, yaitu diatas 100% (memuaskan), kecuali BBPOM di Surabaya dengan nilai 98,32%..

Capaian realisasipersentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 100%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka diprediksi Target persentase obat yang memenuhi syarat di Tahun 2019 adalah 94% akan terpenuhi karena terjadi perubahan cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019 .Kriteria Obat dilakukan secara acak, meliputi:

- 1) Tidak memiliki Nomor Ijin Edar/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- 6) Memiliki Nomor Ijin Edar



3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan persentase seluruh obat yang disampling dan diuji dikurangi dengan persentase obat yang tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 90,20 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase OT MS} = \frac{\text{Produk OT MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat Tradisional yang diuji}} \times 100 \%$$

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	83	90,20	108,67	Memuaskan

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 108,67% dengan realisasi sebesar 90,2 % obat tradisional tradisional yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan produk obat tradisional MS yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 525 sampel terhadap sampel obat tradisional yang diuji sebanyak 525 sampel. Jenis obat tradisional yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2018 yaitu kategori obat tradisional yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritis meliputi obat tradisional impor, obat tradisional stamina, obat tradisional pelangsing, obat tradisional pegel linu, obat tradisional nafsu makan, obat kuasi, produk UKOT/UMOT, MLM, dan obat tradisional yang dijual online. .

Jumlah keseluruhan sampel adalah 582 sampel, dan hanya 525 sampel yang selesai uji, dan sisanya sebanyak 57 sampel obat tradisional yang carry over di tahun 2019.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat kategori memuaskan antara lain :

- Kategori sampling untuk sampel obat tradisional yang diuji adalah yang telah memiliki nomor ijin edar sehingga hasil pengujian masuk dalam kategori memenuhi syarat, dimana penilaian terhadap obat tradisional yang telah memiliki izin edar telah diawasi melalui premarket dan post market produk obat tradisional
- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.
- Penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya Obat Tradisional mengandung BKO, penyebaran brosur dan leaflet, KIE dengan tokoh masyarakat terkait produk Obat tradisional tradisional hampir di seluruh Kabupaten yang telah di tentukan untuk kegiatan KIE tokoh masyarakat , dengan adanya kegiatan ini diharapkan output dari

masyarakat agar berperan aktif melaporkan apabila menemukan peredaran secara ilegal Obat tradisional Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat tradisional

- Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan kepada kelompok pengusaha Usaha Kecil Obat tradisional Tradisional pada saat melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang dipersyaratkan
- Intervensi yang dilakukan secara rutin terhadap sarana produksi obat tradisional tradisional, output yang diharapkan agar kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat tradisional Tradisional yang Baik

Perbandingan realisasi indikator Persentase Obat tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.22.

Perbandingan capaian kinerja Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	108,67	110,40	100	126,72

Gambar 3.19. Perbandingan capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja kedua, pencapaian BBPOM di Makassar realif sama dengan BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung , yaitu diatas 100% (memuaskan), kecuali BBPOM di Semarang dengan nilai 126,72% (Tidak dapat di simpulkan).

Capaian realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 108,67 %, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka diprediksi Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Tahun 2019 berkurang dari 83% menjadi 65 % karena terjadi perubahan cara sampling pada sampel obat Tradisional yaitu target produk Obat tradisional yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019.

Kriteria Obat Tradisional dilakukan secara acak, meliputi:

- 1) Tidak memiliki Nomor Ijin Edar/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- 6) Memiliki Nomor Ijin Edar



4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat dihitung dengan cara membandingkan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dengan total kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 99,72 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Kos MS} = \frac{\text{Produk Kos MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat yang diuji}} \times 100$$

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Indikator Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	92	99,72	108,39	Memuaskan

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 108,39 % dengan realisasi sebesar 99,72 0 % kosmetik yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan produk kosmetik memenuhi syarat yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 1073 sampel terhadap sampel kosmetik yang diuji sebanyak 1076 sampel. Jenis kosmetik yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2018 yaitu kosmetika yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut, rambut, sediaan mandi dan mandi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, Multi Level Marketing (MLM), dan media on-line.

Jumlah keseluruhan sampel adalah 1.349 sampel, dan hanya 1.076 sampel yang selesai ujidan sisanya sebanyak 273 sampel obat yang carry over di tahun 2019.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori memuaskan / Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator, antara lain :

- Kategori sampling untuk sampel obat yang diuji adalah yang telah memiliki nomor ijin edar sehingga hasil pengujian masuk dalam kategori memenuhi syarat, dimana penilaian terhadap obat yang telah memiliki izin edar telah diawasi melalui premarket dan post market produk obat
- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, KIE dengan tokoh masyarakat tentang produk kosmetika yang dihadiri oleh 2.468 penduduk Kabupaten/ Kota Makassar, Maros, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Gowa, Takalar, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Soppeng, Wajo, Bone, Pinrang, Sinjai, Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap media massa, cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang

aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika.

- Penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi dan sarana distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi kosmetika mengandung bahan berbahaya, menjual kosmetika tanpa ijin edar, menjual kosmetika yang sudah ditarik dari peredaran.
- Pengawasan ke sarana sarana distribusi kosmetika dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan prosentase kosmetika yang memenuhi standar.
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap 11.672 jenis produk kosmetik senilai Rp. 543.891.000,- yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

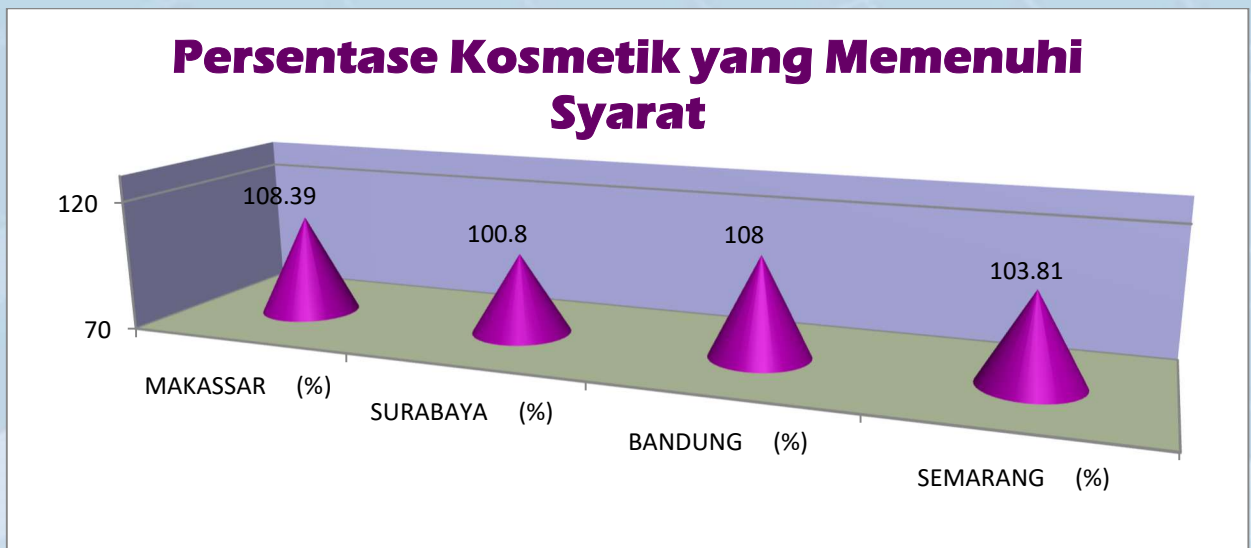
Perbandingan realisasi indikator Persentase kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.24

Perbandingan capaian kinerja Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	108,39	100,80	108	103,81

Gambar 3.20. Perbandingan capaian kinerja Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja keempat, pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dengan ketiga Balai Besar di Surabaya dan BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, yaitu diatas 100% (memuaskan).

Capaian realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 108,39 %, apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka diprediksi Target persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Tahun 2019 berkurang dari 92 menjadi 80 % karena terjadi perubahan cara sampling pada sampel kosmetik yaitu target produk kosmetik yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019 .

Kriteria Obat Tradisional dilakukan secara acak, meliputi:

- 1) Tidak memiliki Nomor Ijin Edar/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- 6) Memiliki Nomor Ijin Edar



5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan persentase seluruh suplemen kesehatan yang disampling dan diuji dikurangi dengan persentase suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 90,20 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase SK} = \frac{\text{Produk Suplemen Kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Suplemen Kesehatan yang diuji}} \times 100 \%$$

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	82	99,01	120,74	Memuaskan

Capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 120,74 % dengan realisasi sebesar 99,01 % Suplemen Kesehatan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan produk Suplemen Kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 202 sampel terhadap sampel Suplemen Kesehatan yang diuji sebanyak 204 sampel. Jenis Suplemen Kesehatan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2018 yaitu kategori produk suplemen kesehatan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi suplemen untuk stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor.

Jumlah keseluruhan sampel Suplemen Kesehatan adalah 225 sampel, dan hanya 204 sampel yang selesai ujidan sisanya sebanyak 21 sampel obat yang carry over di tahun 2019.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat kategori memuaskan antara lain :

- Kategori sampling untuk sampel obat yang diuji adalah yang telah memiliki nomor ijin edar sehingga hasil pengujian masuk dalam kategori memenuhi syarat, dimana penilaian terhadap obat yang telah memiliki izin edar telah diawasi melalui premarket dan post market produk obat
- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.

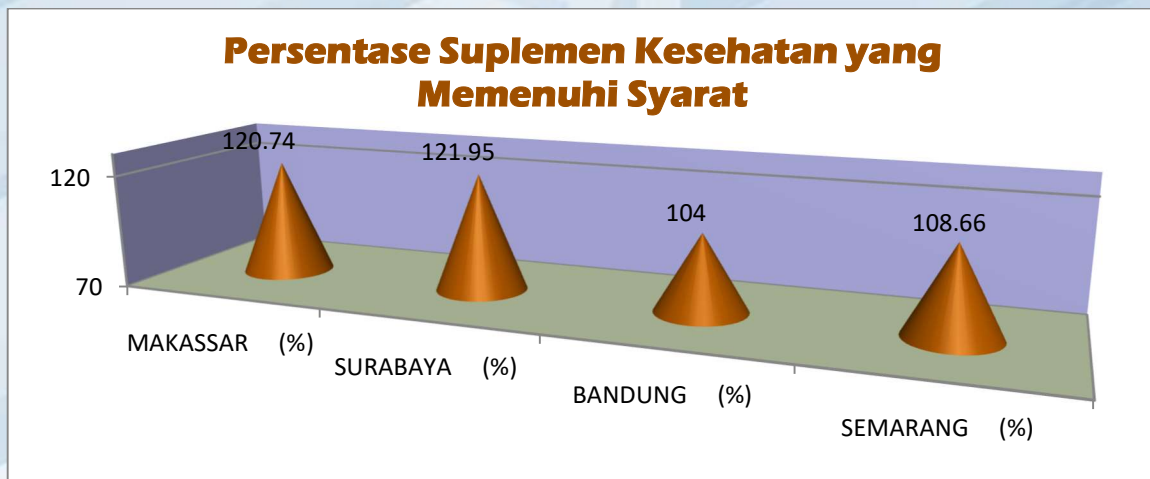
Perbandingan realisasi indikator Persentase kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.26

Perbandingan capaian kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	120,74	121,95	104	108,66

Gambar 3.21. Perbandingan capaian kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja kelima, pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dengan ketiga Balai Besar di Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang, yaitu diatas 100% (memuaskan).

Capaian realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 108,39 %, apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka Target persentase Suplemen

Kesehatanyang memenuhi syarat di Tahun 2019 bertambah dari 82 % menjadi 87 % karena terjadi perubahan cara sampling pada sampel Suplemen Kesehatan yaitu target produk Suplemen Kesehatan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019.

Kriteria Suplemen Kesehatan dilakukan secara acak, meliputi:

- 1) Tidak memiliki Nomor Ijin Edar/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- 6) Memiliki Nomor Ijin Edar



6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan cara sampel Makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibandingkan jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan. Sampling dilakukan terhadap pangan olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar yang ditetapkan melalui pedoman sampling Tahun 2018.

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase pangan yang memenuhi syarat sebesar 92,05 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Makanan MS} = \frac{\text{Produk Makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Makanan yang diuji}} \times 100$$

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	90	92,05	102,28	Memuaskan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 102,28 % dengan realisasi sebesar 92,05% makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan produk makanan MS yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 997 sampel terhadap sampel makanan yang diuji sebanyak 1.083 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2018 yaitu kategori produk sediaan kesehatan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; sereal; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur dan produk olahannya; pemanis, madu; garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap pangan campuran (komposit); makanan spesifik daerah, pangan jajanan anak sekolah, pangan DNA dan kemasan pangan.

Jumlah keseluruhan sampel makanan adalah 1.290 sampel, dan hanya 1.083 sampel yang selesai uji dan sisanya sebanyak 207 sampel makanan yang carry over di tahun 2019.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori memuaskan antara lain disebabkan oleh :

- Kategori sampling untuk sampel makanan yang diuji adalah yang telah memiliki nomor ijin edar sehingga hasil pengujian masuk dalam kategori memenuhi syarat, dimana

penilaian terhadap obat yang telah memiliki izin edar telah diawasi melalui premarket dan post market produk obat

- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.
- Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap 449 jenis produk pangan senilai Rp. 4.123.750.275,- yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor pangan yang illegal.
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat Car Free Day
- Penyuluhan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada 500 orang penduduk Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) telah dilakukan kepada ... pengusaha pangan pada saat petugas BBPOM di Makassar melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi persyaratan yang berlaku
- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB termasuk penataan ruang dan pendampingan pelaku usaha.

Perbandingan realisasi indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

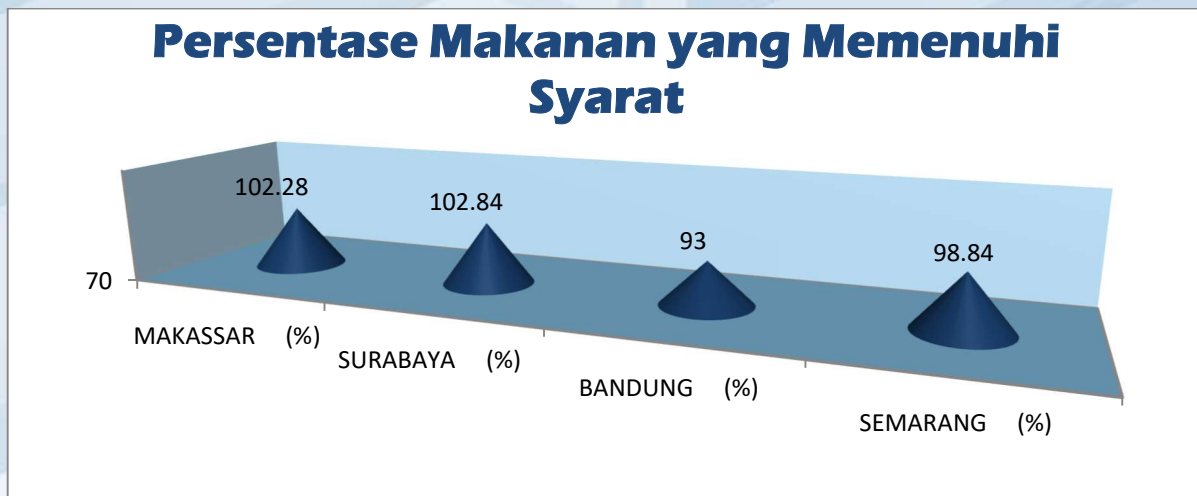
Tabel 3.28

Perbandingan capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	102,28	102,84	93	98,84

Gambar 3.22

Perbandingan capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja keenam, pencapaian BBPOM di Makassar realif sama dengan Balai Besar di Surabaya yaitu diatas 100% (memuaskan), namun berbeda dengan dua Balai Besar POM lainnya di bawah 100 % BBPOM di Bandung yaitu 93 % dan BBPOM di Semarang yaitu yaitu 98,84 %.

Capaian realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 10,28 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka diprediksi Target persentase makanan yang memenuhi syarat di Tahun 2019 turun dari 90 % menjadi 72 % karena terjadi perubahan cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019.

Kriteria makanan dilakukan secara acak, meliputi:

- 1) Tidak memiliki Nomor Ijin Edar/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- 6) Memiliki Nomor Ijin Edar



Sasaran 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indikator Indeks Kepatuhan (compliance Index) pelaku usaha dibidang obat tradisional dan makanan di wilayah kerja Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut

1. Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar



Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non-profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel

- Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
- Data industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Resiko (PMR)

Metodologi

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal hierarchy process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1. Evaluasi terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM)

Tabel 3.29

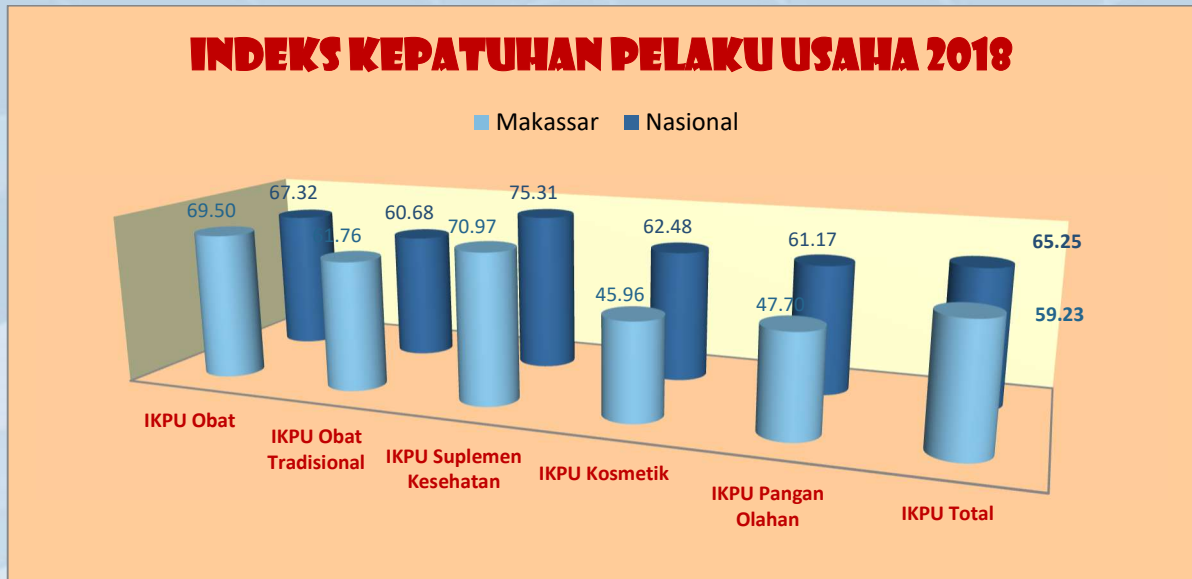
Capaian Kinerja Indikator Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60	59,23	98,72%	Cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah 59,23 dibawah dari target sebesar 60,0 yang telah diperjanjikan dengan capaian 98,72 %.

Gambar 3.23

Perbandingan Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dan ,
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Nasional tahun 2018



Realisasi Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat tradisional dan Makanan BBPOM di Makassar yaitu 59,23 dibawah Capaian Indeks kepatuhan pelaku usaha secara nasional sebesar 65,25.

Untuk menghitung indeks kepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) dimana pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1, sehingga pengukuran indeks kepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan tahun 2018 dihitung berdasarkan pencapaian tahun 2017.

Dari hasil pengolahan data yang berasal dari unit terkait (Deputi 1, 2, 3, 4, dan Balai Besar/BPOM), namun diukur oleh PRKOM, capaian indikator Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat tradisional dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar masih dikategorikan dengan kriteria cukup. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan makanan yang belum memenuhi ketentuan, dimana

semakin banyak sarana yang tidak memenuhi ketentuan maka indeks kepatuhannya akan semakin kecil/rendah.

Capaian indikator Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2018 adalah sebesar 98,72. Hal ini merupakan capaian yang diukur berdasarkan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Obat, IKPU Obat Tradisional, IKPU Suplemen Kesehatan, IKPU Kosmetik, dan IKPU Pangan Olahan, sehingga capaian IKPU secara total dikategorikan dalam kategori **CUKUP**.

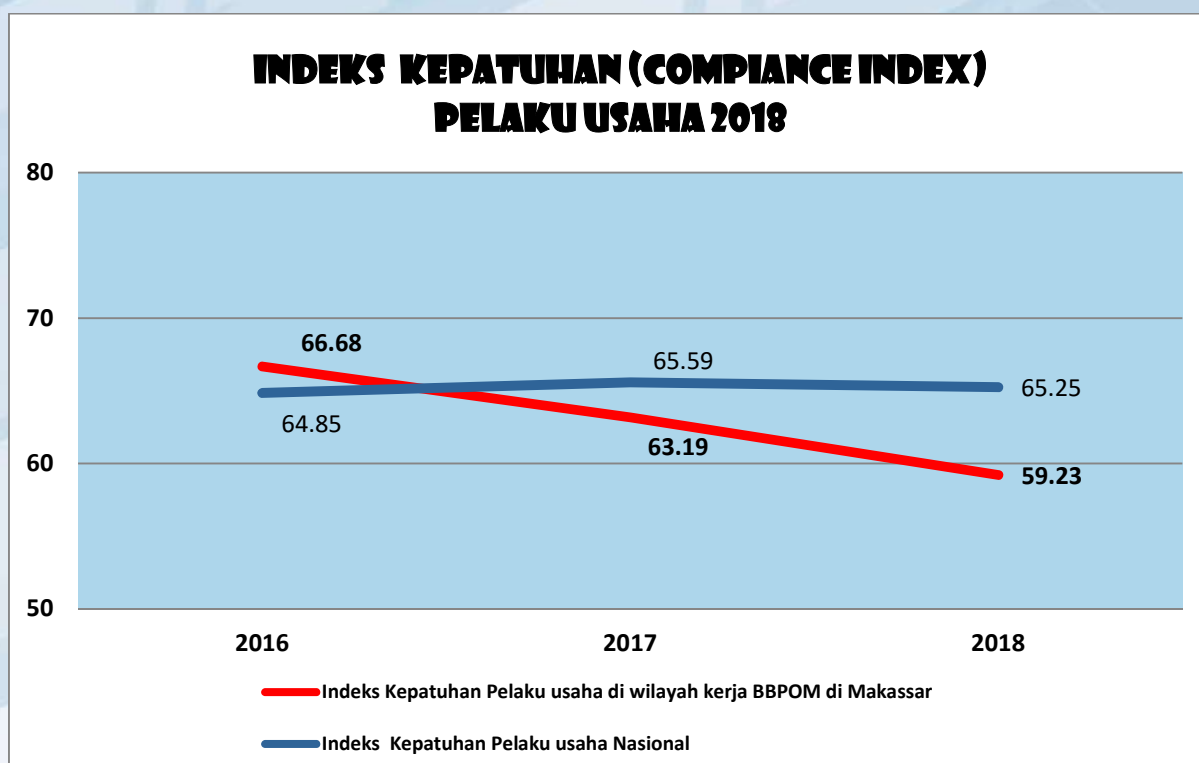
Tabel 3.30 Perbandingan Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018

Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha	2016	2017	2018
Indeks Kepatuhan Pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Makassar	66,68	63,19	59,23
Indeks Kepatuhan Pelaku usaha Nasional	64,85	65,59	65,25

Hasil capaian indikator indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2018 menunjukkan penurunan. Hal ini tergambar pada hasil perhitungan menggunakan analisis AHP yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Badan POM dengan nilai Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar adalah sebesar 59,23 atau menurun 3,96 poin dari indeks tahun 2017 adalah sebesar 63,19 dan mengalami penurunan kembali 3,49 poin dari nilai

indeks tahun 2016, Nilai indekskepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2016 -2018 berada dibawahIndekskepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan Nasional. Dengan kata lain dapat disimpulkan Indeks kepatuhan(*Compliance index*) pelaku usahaBalai Besar POM di Makassar mengalami trand menurun selama 3 tahun terakhir (2016-2018). Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut :

Gambar 3.24Perbandingan Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dan Indeks Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Nasional tahun 2016, 2017 dan 2018



Hal utama yang mempengaruhi capaian indeks kepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar kategori cukup dengan nilai 98,72 % atau mengalami penurunan sebanyak 3,96 poin berasal dari :

Penurunan Indeks kepatuhan pelaku usaha untuk komoditi kosmetik sebesar 32,86 poin dari 78,82 menjadi 45,96 hal ini disebabkan karena jumlah sarana produksi kosmetik di wilayah kerja BBPOM Makassar semula 5 sarana tahun 2016 menjadi 1 sarana produksi kosmetik yaitu Gayatri Sumantri di tahun 2017, meskipun indeks kepatuhan pelaku usaha obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan rata-rata mengalami kenaikan.

Perbandingan realisasi indeks kepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

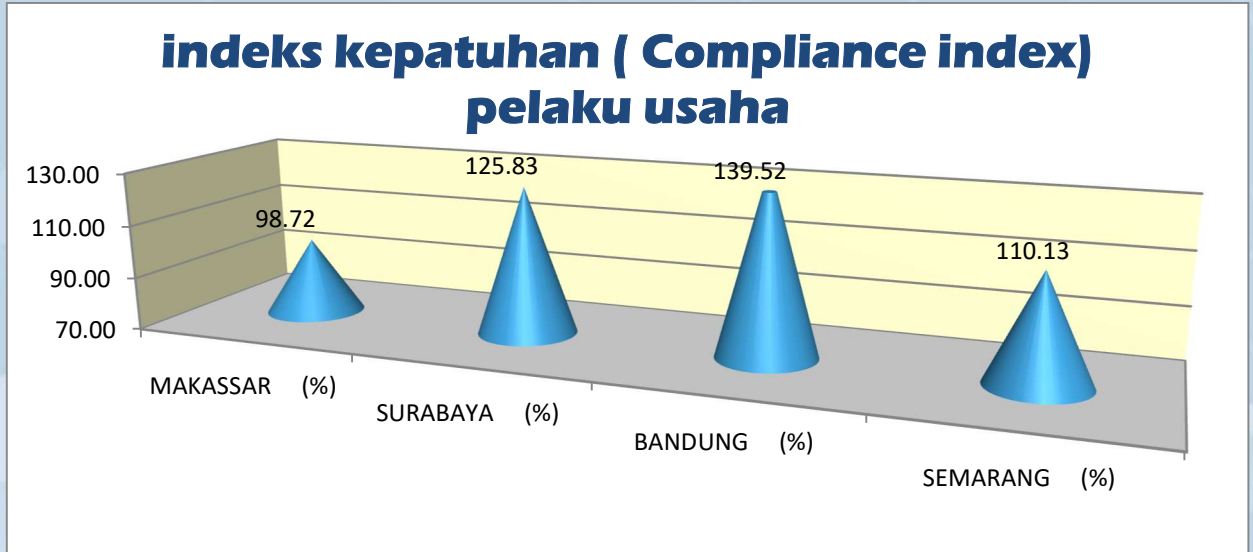
Tabel 3.31

Perbandingan capaian kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
indeks kepatuhan(<i>Compliance index</i>) pelaku usaha dibidang obat dan makanan	98,72	125,83	139,52	110,13

Gambar 3.25

Perbandingan capaian kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja indekskepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar, pencapaian BBPOM di Makassar dibawah capaian Balai Besar POM di Surabaya, Bandung dan Semarang yaitu diatas 100% (memuaskan)

Capaian realisasinilaiindekskepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassartahun 2018 adalah 98,72 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka Target Nilai indeks kepatuhan(*Compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassardi Tahun 2019 meningkat dari 60 menjadi 61, diharapkan tahun 2019 indeks nilai kepatuhan pelaku usaha kosmetik mengalami kenaikan dengan cara mendorong sarana produksi dan distribusi kosmetik menerapkan CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) serta percepatan terhadap penyelesaian CAPA pada temuan critical dan major untuk sarana produksi kosmetik.



Sasaran 3

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar



1. Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n. Evaluasi terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

Tujuan

Tujuan dari survei ini adalah untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Indikator Indeks kepatuhan (*Compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat tradisional dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60	60,71	101,18	Baik

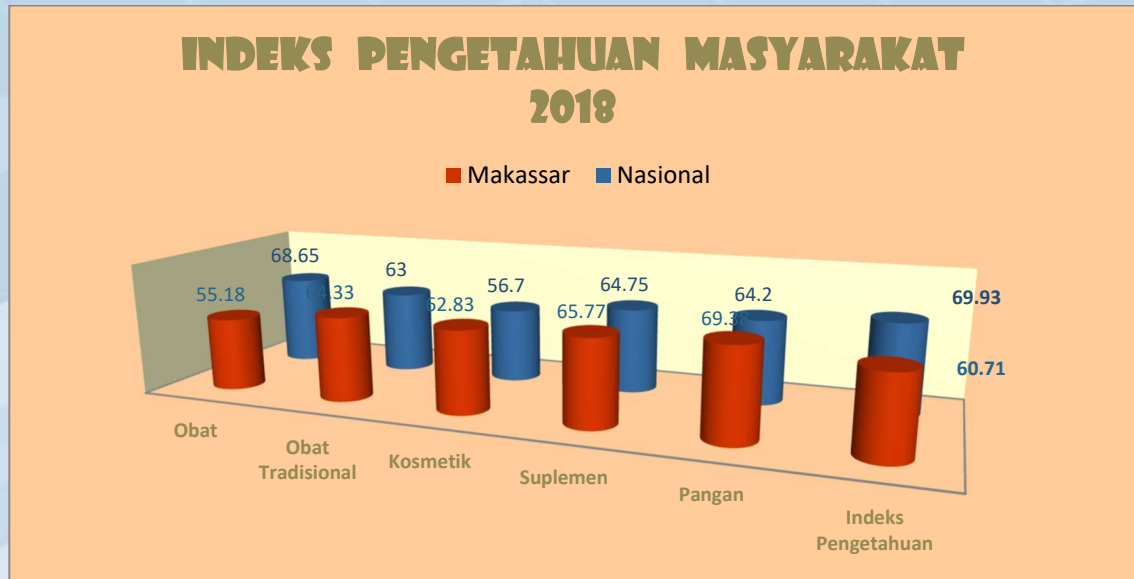
Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat tradisional dan Makanan adalah sebagai berikut:

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah 60,71 di atas dari target sebesar 60,0 yang telah diperjanjikan dengan capaian 101,18 %. Realisasi Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan BBPOM di Makassar di atas Capaian Indeks atas Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan secara nasional sebesar 63,93 .

Gambar 3.26

Perbandingan Indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dan Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan Nasional tahun 2018



Realisasi Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yaitu 60,71 dibawah Capaian Indeks pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan secara nasional sebesar 69,93.

Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap skor total komoditas. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun 2018/

Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP

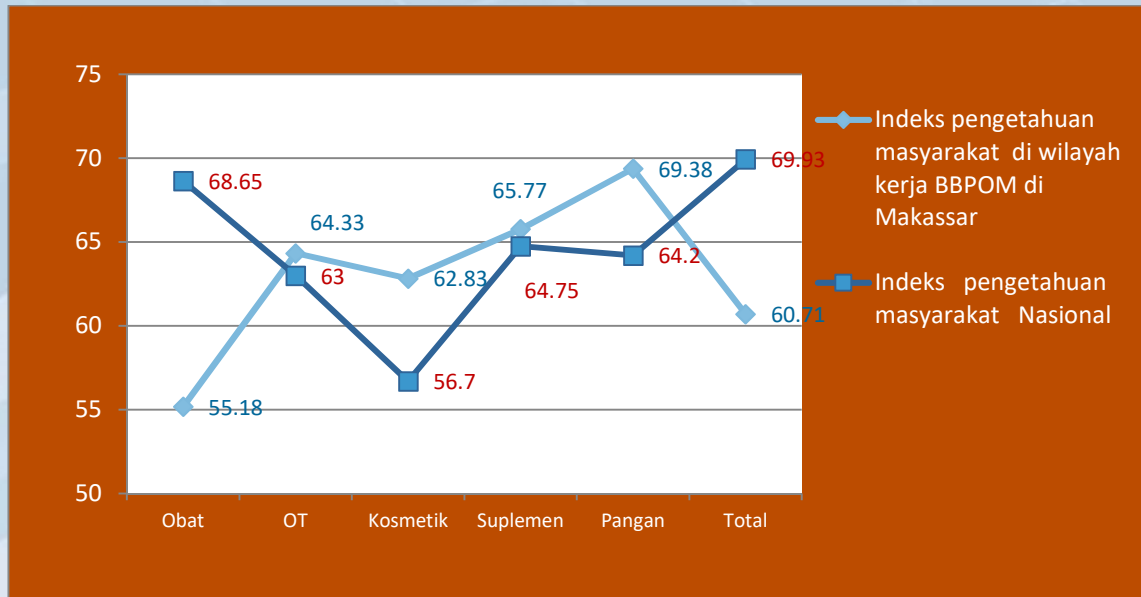
Capaian indikator Indeks pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar pada tahun 2018 adalah sebesar 101,18. Hal ini merupakan capaian yang diukur berdasarkan Indeks pengetahuan masyarakat di wilayah kerja BBPOM di Makassar terhadap Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan, sehingga capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan secara total dikategorikan dalam kategori Baik.

Tabel 3.33 Perbandingan Indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dan Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan Nasional per komoditi

Indeks Pengetahuan Masyarakat	Obat	OT	Kosmetik	Suplemen	Pangan	Total
Indeks pengetahuan masyarakat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	55,18	64,33	62,83	65,77	69,38	60,71
Indeks pengetahuan masyarakat Nasional	68,65	63	56,7	64,75	64,2	69,93

Nilai indeks pengetahuan masyarakat di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018 berada dibawah Indeks pengetahuan masyarakat di bidang obat dan makanan Nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut :

Gambar 3.27 Perbandingan Indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dan Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan Nasional per komoditi



Hal utama yang mempengaruhi capaian pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar berada dibawah 9,22 poin dibandingkan dengan hasil survei pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan secara nasional.adaah karena Rendahnya hasil survei pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar untuk komoditi obat 13,47 point dibawah survei nasional.

Perbandingan realisasi indeks pengetahuan masyarakat bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

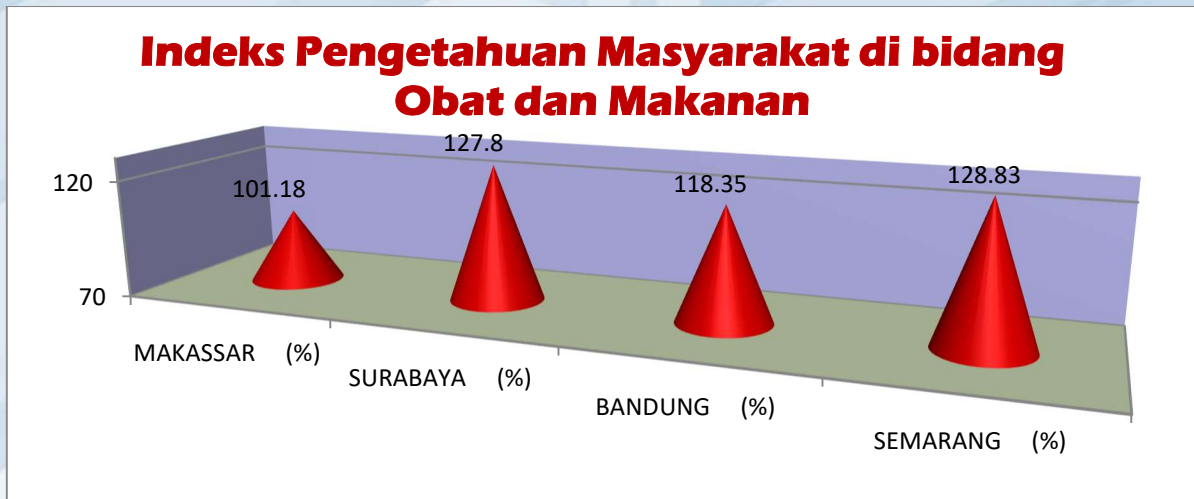
Tabel 3.34

Perbandingan capaian kinerja Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Indekspengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	101,18	127,80	118,35	128,83

Gambar 3.28

Perbandingan capaian kinerja Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja Indeks pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan dalam wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sebesar 101,18. Capaian ini dikategorikan memuaskan, namun pencapaian BBPOM di Makassar masih dibawah capaian Balai Besar POM di Bandung, sementara Balai Besar POM di Surabaya dan Semarang tidak dapat disimpulkan.

Capaian realisasi nilai Indeks pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanandi wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2018 adalah 101,18 apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015- 2019) maka Target Nilai Indeks pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar di Tahun 2019 meningkat dari 60 menjadi 61, diharapkan tahun 2019 Indeks pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan mengalami kenaikan dengan cara mendorong intensifikasi kegiatan KIE, dalam berbagai metode dan media untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan, terutama pengetahuan masyarakat tentang obat.



Sasaran 4

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat tradisional dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 5 Indikator sebagai berikut

1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan
5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 100 Realisasi 81,96 Capaian 81,96%

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Target 50 Realisasi 32,6 Capaian 64,32 %

Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Target 65 Realisasi 39,66 Capaian 61,02 %

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 75 Realisasi 86,30 Capaian 115,07 %

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Target 82 Realisasi 99,01 Capaian 120,74%

Pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat tradisional dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan “ dengan 5 indikator tersebut hanya 2 indikator mencapai target yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat tradisional dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar



1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan

Standar adalah Pedoman Sampling tahun berjalan. Pemenuhan Pengujian adalah parameter uji yang dapat dipenuhi oleh Balai dibandingkan terhadap parameter uji dalam Pedoman Sampling sesuai sampel yang disampling masing-masing Balai.

Tools

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah parameter uji wajib yang diuji dibagi jumlah parameter uji wajib yang tercantum pada Pedoman Sampling sesuai sampel yang disampling dikali seratus persen.

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di provinsi Sulawesi Selatan , hal ini ditunjukkan belum dicapainya target persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 81,96 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemenuhan pengujian} = \frac{\text{Jumlah Parameter uji wajib yang diuji}}{\text{Jumlah parameter uji wajib pada pedoman sampling yang disampling}} \times 100 \%$$

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi	100	81,96	81,96	Cukup

. Capaian indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 adalah 81,96 dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 100 % dengan kriteria Cukup.

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 102,28 % dengan realisasi sebesar 92,05 % makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan jumlah parameter uji wajib yang diuji sebanyak 3530 sampel terdiri dari 2447 sampel obat, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan dan 1083 sampel pangan terhadap jumlah parameter uji wajib yang tercantum pada pedoman sampling sesuai sampel yang disampling sebanyak 4307 sampel.

Parameter uji wajib yang tercantum pada pedoman sampling sesuai sampel yang di sampling terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Pemenuhan pengujian sesuai standar tiap komoditi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi per komoditi tahun 2018

Komoditi	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)
Obat	768	585	76,17
Obat Tradisional	675	582	86,22
Suplemen Kesehatan	225	204	90,66
Kosmetik	1349	1076	79,76
Pangan	1290	1083	83,95
Total	4307	3530	81,96

Jumlah keseluruhan parameter uji wajib yang tercantum pada pedoman sampling sesuai sampel yang disampling sebanyak 4307 sampel, namun jumlah parameter uji wajib yang selesai diuji adalah 3530 sampel dan sisanya sebanyak 777 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang belum diuji berdasarkan parameter uji wajib yang tercantum pada pedoman sampling atau akan menjadi sampel yang *carry over* di tahun 2019.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Sulawesi Selatan kategori cukup antara lain disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut:

- Kategori sampling untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang diuji adalah yang telah memiliki nomor ijin edar sehingga seluruh sampel termasuk dalam parameter uji wajib
- Keterbatasan Sumber daya dan perubahan mutasi pegawai tenaga laboratorium ke Loka Palopo

Perbandingan realisasi indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

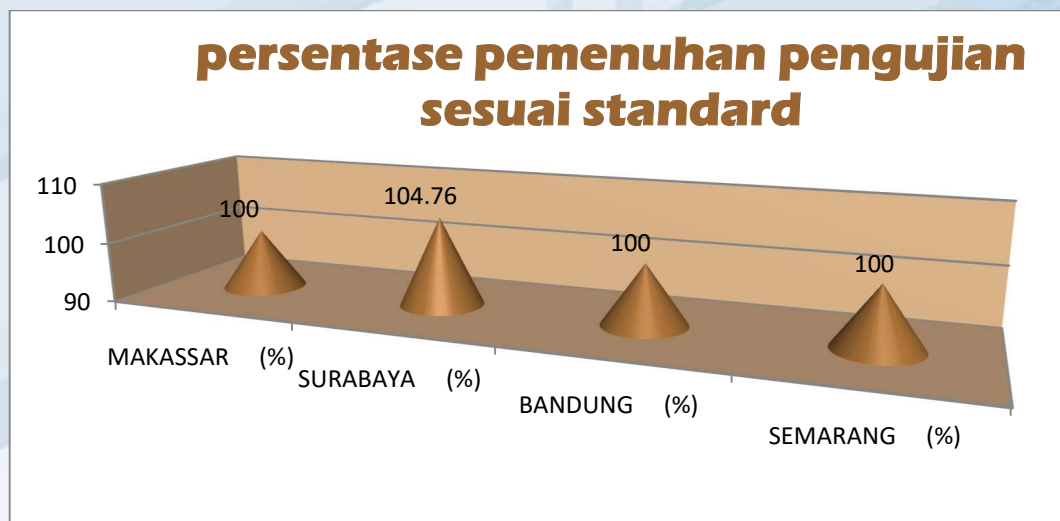
Tabel 3.37

Perbandingan capaian kinerja persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
persentase pemenuhan pengujian sesuai standardi provinsi sulawesi selatan	81,96	100	100	100

Gambar 3.29

Perbandingan capaian kinerja persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

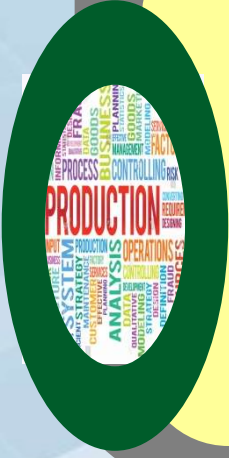


Untuk sasaran indikator kinerja persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian BBPOM di Makassar 81,96% (cukup) dimana nilai tersebut berada dibawah dari 3 Balai Besar di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang yaitu 100% (baik).

Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 100 %, berdasarkan hasil realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 81,96 %.

Beberapa rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk periode 2019 agar pencapaian target persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan target 100 % ditahun 2019 bisa tercapai :

1. Perubahan cara sampling pada sampel komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yaitu target produk yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019, dilakukan secara acak, meliputi:
 - a. Tidak memiliki Nomor Ijin Edar/produk ilegal termasuk palsu
 - b. Produk kedaluwarsa
 - c. Produk rusak
 - d. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
 - e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
 - f. Memiliki Nomor Ijin Edar
2. Pola penyebaran ASN berdasarkan pada kesesuaian analisis Beban kerja setiap bidang
3. Perkuatan kompetensi dan penambahan SDM khususnya pengujian melalui intensifikasi bimbingan teknis dan rekrutmen CPNS
4. Peningkatan pemenuhan Standar Minimum Peralatan Laboratorium sesuai Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018.



2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.

- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- 3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
 - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
 - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- 4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
 - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- 5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini ditunjukkan dengan belum tercapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 32,16 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase sarana} \\
 \text{Produksi yang} \\
 \text{Memenuhi Ketentuan}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan} \\
 \text{prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan} \\
 \text{yang diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100 \%$$

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat tradisional dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50	32,16	64,32	Kurang

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 64,32 % dengan realisasi sebesar 32,16 % sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 50 % dengan kriteria Cukup.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 46 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 143 sarana.

Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
 - a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
 - b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
 - b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
 - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori cukup disebabkan dari 112 sarana industri pangan olahan hanya 28 sarana yang dapat memenuhi ketentuan dan sisanya sebanyak 84 sarana produksi pangan olahan tidak memenuhi persyaratan antara lain hygiene sanitasi, *lay out* produksi dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (untuk Produsen pangan olahan).

Perbandingan realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

Tabel 3.39

Perbandingan capaian kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	61,02	100,32	120	76,47

Gambar 3.30

Perbandingan capaian kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, pencapaian BBPOM di Makassar adalah 61,02 kategori Kurang dan berada dibawah pencapaian BBPOM di Semarang dengan kriteria Cukup serta berada dibawah Balai Besar di Surabaya dan Balai Besar POM di Bandung yaitu diatas 100% (memuaskan).

Hal yang mempengaruhi rendahnya capaian indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan berada pada kategori kurang antara lain :

1. Kurang berhasilnya penyampaian informasi dan pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana produksi obat dan makanan khususnya sarana produksi pangan olahan
2. Kurang efektifnya pengawasan sarana produksi pangan olahan sehingga masih terdapat temuan major dan critical berulang
3. Kurang efektifnya penyebaran informasi kepada pelaku usaha

Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2019 adalah 55 %, berdasarkan hasil realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 32,16 %. Sehingga beberapa langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk periode 2019 agar pencapaian target persentase Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar target 55 % di tahun 2019 bisa tercapai :

1. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pada sarana produksi pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan
2. Perlu pemahaman dan pengawalan terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi

3. Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi, seksi inspeksi dan Bidang Infokom terkait pendampingan pada sarana Industri pangan MD dan IRTP .



3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.

Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.

Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.

Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di provinsi sulawesi selatan , hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 39,66 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusii Obat Dan Makanan yang di diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100 \%$$

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Indikator Persentase Persentase sarana distribusi Obat tradisional yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	65	39,66	61,02	Kurang

Capaian persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 61,02 % dengan realisasi 39,66 % sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 65 % dengan kriteria Kurang

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 635 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 1601 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksa yaitu :

- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
- d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
- e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputy Tahun 2016) yang berlaku.
- f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
- g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori kurang disebabkan Pada 624 sarana distribusi obat hanya 185 sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dan sisanya sebanyak 439 sarana distribusi obat tidak memenuhi ketentuan karena tidak tertib administrasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Perbandingan realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

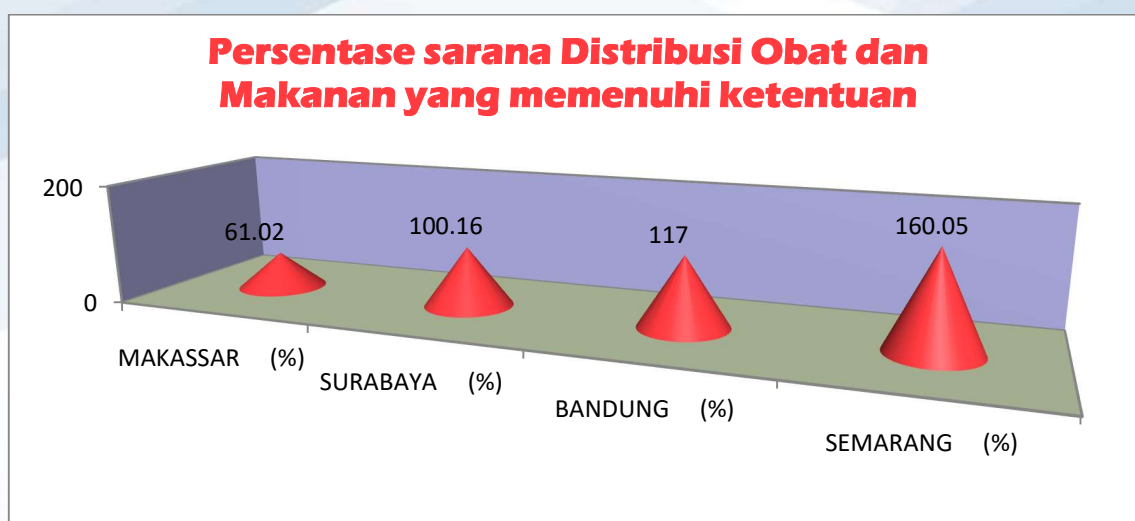
Tabel 3.41

Perbandingan capaian kinerja Persentase sarana distribusi Obat tradisional yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	61,02	100,16	117	160,05

Gambar 3.31

Perbandingan capaian kinerja Persentase sarana distribusi Obat tradisional yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, pencapaian BBPOM di Makassar 61,02 % (Kurang) dibawah dari Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar POM di Bandung yaitu diatas 100% (memuaskan) sedangkan Balai Besar POM di Semarang diatas 125 (Tidak dapat disimpulkan)

Hal yang mempengaruhi rendahnya capaian indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan berada pada kategori kurang antara lain :

1. Kurang berhasilnya penyampaian informasi dan pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana Distribusi obat khususnya Pengusaha Besar Farmasi (PBF) lokal
2. Kurang efektifnya pengawasan sarana distribusi obat sehingga masih terdapat temuan berulang
3. Kurang efektifnya penyebaran informasi kepada sarana distribusi obat

Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2019 adalah 70 %, berdasarkan hasil realisasi persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 39,66 %.

Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk periode 2019 agar pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan target 70 % ditahun 2019 bisa tercapai :

1. Perlu pemahaman dan pengawalan terhadap sarana distribusi terutama sarana distribusi obat terkait persyaratan minimal CDOB yang wajib dipenuhi oleh sarana distribusi obat
2. Perkuatan kompetensi SDM Bidang Pemeriksaan terkait pendampingan dan inspeksi pada sarana distribusi obat yang tidak tertib administrasi CDOB di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan



Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan.

yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di provinsi sulawesi selatan , hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 86,30 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Keputusan Penilaian Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalandiselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.42

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan	75	86,30	115,07	Memuaskan

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 115,07% dengan realisasi sebesar 86,30% keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 75 % dengan kriteria Memuaskan.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 63 sarana terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan sebanyak 73 sarana.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.

Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

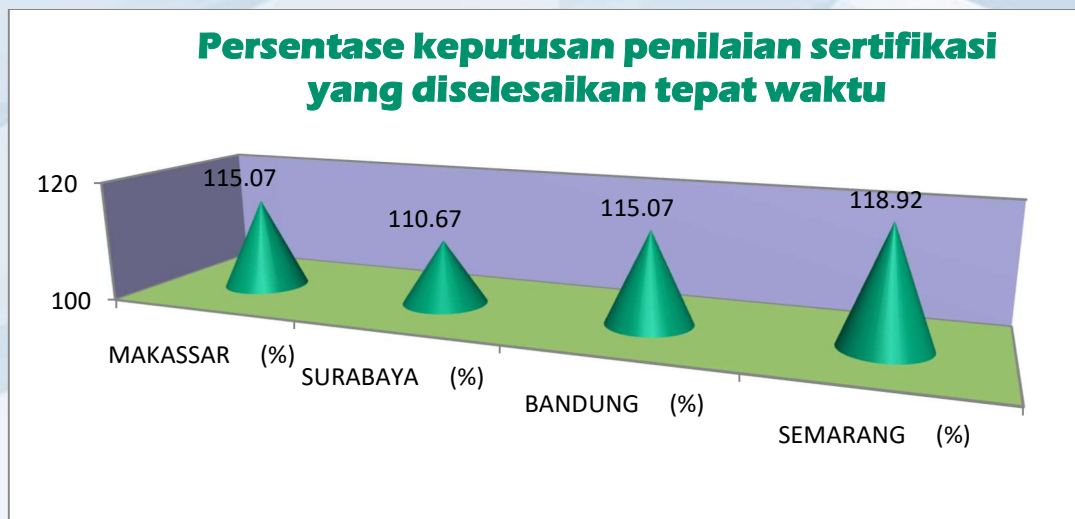
Tabel 3.43

Perbandingan capaian kinerja keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	115,07	110,67	115,07	118,92

Gambar 3.32

Perbandingan capaian kinerja keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dengan 3 Balai Besar di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang diatas 100% (memuaskan).

Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 83 %, berdasarkan hasil realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 86,30 %. Sehingga beberapa langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk periode 2019 agar pencapaian target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan target 86,30 % ditahun 2019 bisa tercapai :

- Perlu penyuluhan dan pendampingan terhadap pelaku usaha agar memenuhi kriteria sarana produksi dan distribusi yang memenuhi ketentuan tepat waktu
- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi pada sarana produksi dan distribusi agar pemenuhan CAPA oleh pelaku usaha tepat waktu.



5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Tindaklanjut hasil pengawasan berupa tindaklanjut yang dilakukan oleh BPOM maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM kepada instansi terkait.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Balai Besar/BPOM maupun BPOM Pusat kepada Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di provinsi sulawesi selatan , hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 68,42 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

Tabel 3.44

Capaian Kinerja Indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat tradisional dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat tradisional dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	38	51,88	136,51	Tidak Dapat disimpulkan

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 136,51% dengan realisasi sebesar 51,88% tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 38 % dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 318 keputusan dibandingkan dengan Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan adalah 613 dengan realisasi 51,88 %.

Tindaklanjut hasil pengawasan berupa tindaklanjut yang dilakukan oleh BPOM dan rekomendasi tindaklanjut kepada instansi terkait.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Balai Besar/BPOM maupun BPOM Pusat kepada Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Hal yang mempengaruhi capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar baik disebabkan Pada 613 Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan terdapat 318 Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diberikan.

Perbandingan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

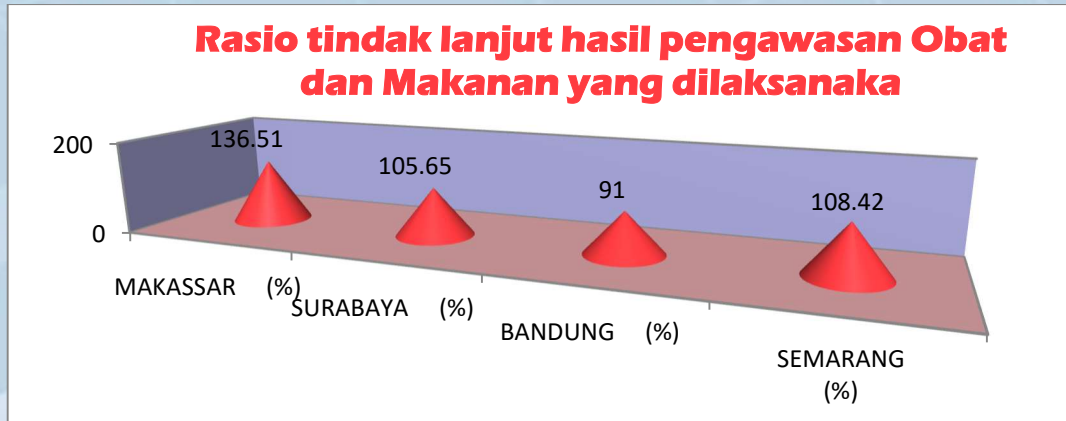
Gambar 3.45

Perbandingan capaian kinerja indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat tradisional dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	136,51	105,65	91	108,42

Gambar 3.33

Perbandingan capaian kinerja indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat tradisional dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada dalam kategori tidak dapat disimpulkan, pencapaian BBPOM di Makassar diatas dari 3 Balai Besar di Surabaya dan Balai Besar POM di Bandung diatas 100% (memuaskan). serta Balai Besar POM di Semarang kategori cukup.

Hal yang mempengaruhi tingginya capaian indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori Tidak dapat disimpulkan antara lain :

1. Kesalahan dalam penentuan target Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
2. Petugas kurang teliti dalam menentukan jenis sarana yang harus diberikan rekomendasi tindak lanjut

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tidak dapat disimpulkan Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target Persentase Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang

dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2019 adalah 50 %, berdasarkan hasil realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah 51,88. Pencapaian target Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar mencapai target yang tidak dapat disimpulkan karena merupakan indikator baru sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah. Sedangkan kesadaran instansi terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BPOM semakin meningkat salah satunya karena implementasi InPres No. 3 Tahun 2017.



Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar



1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar

- Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.
- Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS
- Timeline penyelesaian perkara dari terbitnya SPDP sampai dengan tahap 2 maksimal 6 bulan kecuali DPO.

Tools

Dihitung berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah tercapainya target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 64,28 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Perkara Tahap II} = \frac{\text{jumlah penyelesaian perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS}}{\text{Total Perkara}} \times 100 \%$$

Tabel 3.46

Capaian Kinerja Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50	64,28	128,56	Tidak dapat disimpulkan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 128,56 % dengan realisasi sebesar 64,28 % perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 50 % dengan kriteria baik.

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan jumlah penyelesaian perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS sebanyak 9 kasus terhadap Total perkara sebanyak 14 perkara.

Capaian indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada tahun 2018 adalah 64,28 diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 50 % dengan kriteria baik

Tabel 3.47

Hasil Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2018

No	Kab/Kota	Jenis Produk	Penyidikan Tindak Pidana Obat			
			Total Perkara	Nilai Taksiran Sitaan	Perkara yang di selesaikan hingga Tahap II	Nilai Taksiran Sitaan
1	Makassar	Obat Tradisional	2	264.000.000	2	264.000.000
		Kosmetik	6	601.937.000	3	223.222.000
		Pangan	3	389.445.000	2	146.445.000
2	Bantaeng	Pangan	1	300.000.000	1	300.000.000
3	Bone	Kosmetik	1	228.400.000	1	228.400.000
4	Sidrap	Kosmetik	1	159.120.000	-	-
	Total		14	1.942.902.000	9	1.162.067.000

Gambar 3.34

Perbandingan Jumlah Total Perkara dengan Perkara yang diselesaikan hingga tahap II



Hal yang mempengaruhi capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori baik disebabkan dari 14 kasus projustisia terdapat 9 kasus yang diselesaikan sampai dengan tahap kedua yaitu dengan rincian 2 kasus Obat Tradisional, 3 Kasus pangan dan 4 kasus kosmetik.

Perbandingan realisasi indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

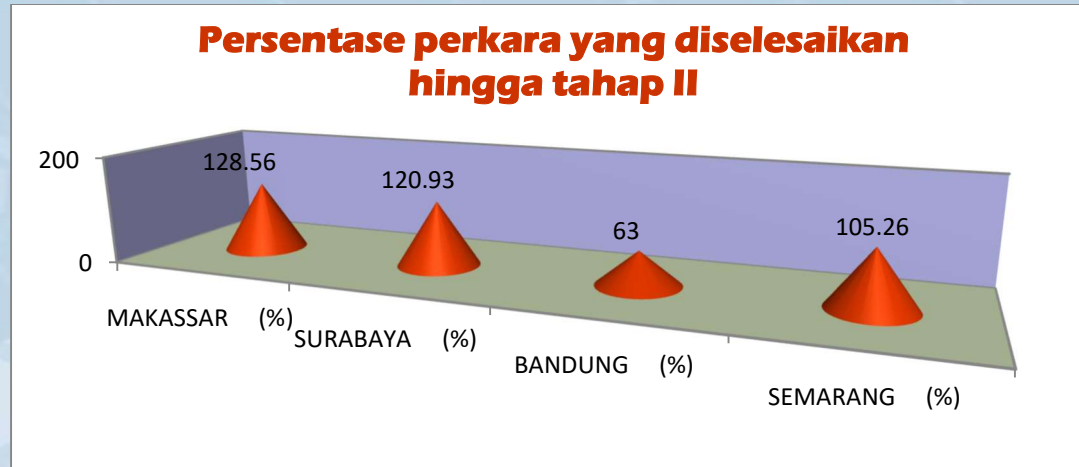
Tabel 3.48

Perbandingan capaian kinerja Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	128,56	120,93	63	105,26

Gambar 3.35

Perbandingan capaian kinerja Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar pencapaian BBPOM di Makassar tidak dapat disimpulkan karena realisasi melebihi target, hal yang sama dengan BBPOM di Surabaya. Adapun BBPOM di Semarang dengan capaian 105,26 kategori baik sedangkan BBPOM di Bandung dengan capaian 63 kategori (Tidak dapat disimpulkan)

Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2019 adalah 50 %, berdasarkan hasil realisasi persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 64,28 %. Sehingga beberapa langkah strategis yang harus tetap dipertahankan untuk periode 2019 agar pencapaian target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar target 50 % ditahun 2019 bisa tercapai :

1. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait, utamanya dengan pengadilan tinggi, kepolisian dan kejaksaan
2. Perkuatan kompetensi SDM Bidang Penindakan dan memiliki kompetensi dasar untuk kegiatan penindakan



Sasaran 5

Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

1. Nilai AKIP BBPOM di Makassar



Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Komponen

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Capaian Kinerja

Pada tahun 2018 BBPOM di Makassar belum berhasil mewujudkan RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM hal ini ditunjukkan belum tercapainya target Nilai AKIP BBPOM di Makassar dengan capaian 94,58 % .

Tabel 3.49Capaian Kinerja Indikator Nilai APIP di BBPOM Makassar tahun 2018

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	78	73,77	94,58	cukup

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar pada tahun 2018 adalah 73,77 dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 78 dengan kriteria Baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja diantaranya konsultasi dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA-K/L, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Nilai AKIP BBPOM di Makassar pada tahun 2018.

Capaian Persentase Nilai AKIP BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 94,58 % dengan realisasi sebesar 73,77 dengan kriteria cukup.

Hasil perhitungan diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM tahun 2018.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).

2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:

- a. Pemenuhan pengukuran (5%)
- b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
- c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:

- a. Pemenuhan pelaporan (3%)
- b. Kualitas pelaporan (7,5%)
- c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:

- a. Pemenuhan evaluasi (2%);
- b. Kualitas evaluasi (5%);
- c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).

5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:

- a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
- b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
- c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Capaian Persentase Nilai AKIP BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 94,58 % dengan realisasi sebesar 73,77 dengan kriteria cukup.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Besar POM di Makassar diuraikan sebagai berikut:

1 Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian kinerja komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai 25,66 atau 85,3 % dari bobot sebesar 30. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan perencanaan kinerja dalam kerangka penerapan SAKIP yaitu dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). Hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan kinerja adalah masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART).

2 Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian kinerja komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 15,00 atau 60,00 % dari bobot sebesar 25. Balai Besar POM di Makassar belum sepenuhnya menerapkan pengukuran kinerja dalam kerangka SAKIP pada tingkat Unit eselon 2 dan unit eselon 3 serta 4, dengan instrument Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja masing-masing unit eselon 3 dan 4. Hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengukuran kinerja dan perlu ditingkatkan adalah hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat Eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan reward & punishment

3 Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian kinerja komponen Pelaporan Kinerja mendapat nilai 13,03 atau 86,86 % dari bobot sebesar 15. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan pelaporan kinerja dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) secara tepat waktu. Hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaporan kinerja adalah Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, meliputi analisis capaian kinerja yang jauh melebihi target, tidak mencapai target, serta kinerja yang tidak dapat dinilai.

4 Evaluasi Kinerja

Hasil penilaian kinerja komponen Evaluasi Kinerja mendapat nilai 7,06 atau 70,58 % dari bobot sebesar 10. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program unit kerja dalam kerangka SAKIP. Hal yang perlu ditingkatkan pada komponen ini adalah dalam evaluasi kinerja belum ada update rencana aksi sehingga unit kerja belum dapat mengendalikan kegiatan secara efektif dan menilai keberhasilan yang telah tercapai, serta kekurangan-kekurangan yang perlu segera diperbaiki.

5 Capaian Kinerja

Hasil penilaian kinerja komponen Capaian Kinerja mendapat nilai 13,03 atau 86,86 % dari bobot sebesar 15. Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian output, pencapaian outcome, dan pencapaian kinerja lainnya. Hal yang perlu ditingkatkan adalah masih terdapat beberapa kinerja atas Sasaran Strategis berupa output/outcome yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di Semarang sesuai tabel berikut :

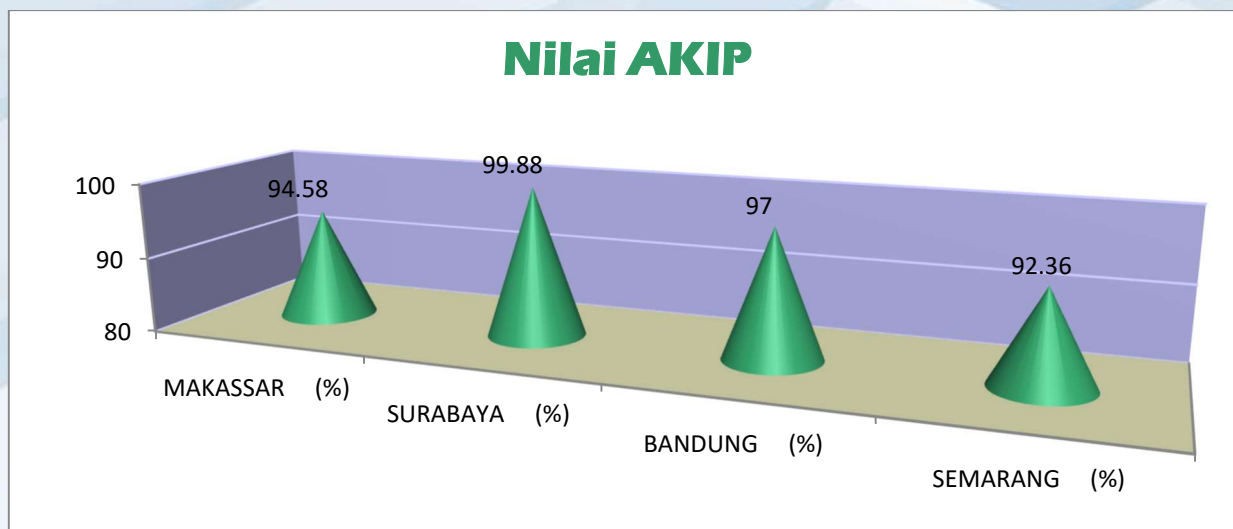
Tabel 3.50

Perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai AKIP di BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA BBPOM di MAKASSAR (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SURABAYA (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di BANDUNG (%)	REALISASI KINERJA BBPOM di SEMARANG (%)
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	94,58	99,88	97	92,36

Gambar 3.36

Perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai AKIP di BBPOM di Makassar dengan Balai Besar POM di Provinsi lainnya tahun 2018



Untuk sasaran indikator kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar pencapaian BBPOM di Makassar relatif sama dengan pencapaian 3 Balai BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang dengan kategori cukup

Sesuai dengan Renstra 2015-2019 target Nilai AKIP BBPOM di Makassar tahun 2019 adalah 81, berdasarkan hasil realisasi Nilai AKIP BBPOM di Makassar tahun 2018 adalah 73,77 Sehingga beberapa langkah strategis yang harus ditingkatkan untuk periode 2019 agar pencapaian target Nilai AKIP BBPOM di Makassar target 81 ditahun 2019 bisa tercapai :

1. Menyelaraskan Sasaran strategis, indikator kinerja pada Renstra sesuai dengan target indikator kinerja
2. Membuat mekanisme yang memudahkan pemantauan dan pengukuran kinerja unit kerja hingga ke level individu
3. Memaksimalkan evaluasi internal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja dengan membuat rencana tindak lanjut perbulan.

Capaian Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM RI dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target disebabkan oleh beberapa hal khususnya pada pengukuran kinerja belum dibahas secara lebih mendalam berdasarkan Balance Score Card dan belum di-*cascading* sampai ke level individu.

3.2.2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Adanya pelantikan SOTK baru untuk eselon 3 dan eselon 4 tanggal 15 Oktober 2018 sedikit banyak mempengaruhi pencapaian kinerja, terutama di Bagian Tata Usaha yang awalnya hanya di eselon 4 berubah menjadi eselon 3 dan terbagi menjadi Subag Umum dan Subag Program dan Evaluasi. Tentu saja perlu waktu untuk menyesuaikan dan membagi tugas yang tadinya terkumpul dalam satu subag menjadi dua subag. Dan yang sangat berubah di Program dan Evaluasi, berdasarkan Peraturan Badan POM No.12 tahun 2018 pasal. 22, membagi tugas sebagai berikut :

Subbagian Program dan Evaluasi (Subbag PE) mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, **penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.**

Dengan jumlah personel yang belum ditentukan berdasarkan SK, pembagian berlangsung berdasarkan pekerjaan dimana 1 Ka Subbag. PE, tim perencana (1 orang fungsional perencana muda; 1 orang pengelola tukin) dan tim keuangan (1 orang bendahara; 2 orang verifikator keuangan; 1 orang pengantar SPM; 1 orang pembuat daftar gaji) otomatis menjadi personel di Subbag PE sebanyak 7 orang harus melakukan tugas penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan juga penjaminan mutu, tata laksana serta pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja. Perlu digaris bawahi perubahan bulan Oktober termasuk periode triwulan IV, yang berdasarkan monitoring kegiatan merupakan waktu-waktu *workload* tinggi diakibatkan menjelang akhir tahun dimana target harus segera terealisasi. Hal tersebut salah satu penyebab kurang optimalnya realisasi kegiatan dan anggaran khususnya untuk penjaminan mutu, tata laksana serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Keputusan Sekertaris Utama BPOM RI No HK.04.02.2.22.06.18.3896 tanggal 22 Juni 2018, penunjukan wakil Ketua MR adalah Kepala Bagian Tata Usaha, sementara di Oktober 2018, terjadi perubahan dimana KaSubag TU bergeser menjadi Kabid Pemeriksaan dan Kabag TU diisi oleh Kabid Pengujian Mikrobiologi. Secara aturan Kabag TU menduduki jabatan wakil Ketua MR. Perubahan ini memerlukan waktu, penyesuaian kegiatan dan tanggungjawab. Kasubag PE otomatis menjadi anggota QMS dan menjadi penyelia dalam kegiatan penjaminan mutu tersebut sesuai uraian tugasnya pada Peraturan Badan POM no.12 tahun 2018.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtangaan. Uraian kegiatan, tidak jauh berbeda antara SOTK lama (Subag TU) dengan SOTK Baru (Subag Umum).

3.2.2. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai Besar POM di Makassar antara lain:

1. Perkuatan Laboratorium, dilakukan baik dari segi jumlah dan kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta penerapan sistem jaminan mutu laboratorium secara konsisten.

Perkuatan Laboratorium, di tahun 2018, diupayakan lebih baik, salah satu cara dengan menyiapkan dan mengembangkan sarana prasarana yakni dilakukan renovasi gedung C Laboratorium Kimia yang meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, NPP dan Kosmetika. Pada tahun 2018 ada penambahan 1 CPNS dan 5 non ASN yang ditempatkan di bidang pengujian. Selain itu di tahun 2018 telah dilaksanakan bimtek internal terkait peningkatan kompetensi penguji laboratorium. Dua hal tersebut merupakan perkuatan laboratorium BBPOM di Makassar. Sementara penerapan system jaminan mutu laboratorium tetap dilaksanakan secara konsisten, meskipun beberapa kendala terjadi disaat gedung laboratorium kimia dilakukan renovasi, sehingga sedikit mempengaruhi kerja staf penguji di lingkup laboratorium pengujian kimia.

2. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan melibatkan lintas sektor terkait yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.

Keterlibatan lintas sektor, telah dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain : kegiatan pemusnahan barang bukti bidang penindakan yang mengundang instansi kepolisian, kejaksaan, BNN, Bea Cukai, departemen Agama, dinas kesehatan, serta melibatkan komunitas pers untuk dipublikasikan. Kemudian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan, Kepala BBPOM di Makassar berinisiatif melakukan advokasi dalam rangka Tata Hubungan Kerja di beberapa kabupaten kota diantaranya Kota Palopo, Kab Bantaeng, Kab Bulukumba, Kab Tana Toraja dan Kab Toraja Utara. Serta kegiatan Sosialisasi Inpres No.3 tahun 2017 di kantor Sekretaris

Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan beberapa instansi terkait yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika. Advokasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya juga dilakukan di beberapa tempat diantaranya kantor Bappeda Kab Bone, kantor Bappeda Kab Pangkep, kantor Dinas Kesehatan Jeneponto, kantor Dinas Kesehatan Bantaeng, dan kantor Walikota Makassar bersama-sama dengan Kepala Bappeda Kota Makassar. Pada tanggal 14 Desember 2018, BBPOM Makassar menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sosialisasi Inpres No. 3 tahun 2017 dan PerMendagri No. 41 tahun 2018 yang menghadirkan Sekda, Bappeda dan Dinas Kesehatan dari 24 Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal 17 Desember 2018 Loka POM Palopo melakukan kegiatan advokasi serupa di Kab Toraja Utara. Tanggal 20 Desember 2018 dilaksanakan FGD SPIP dengan narasumber dari instansi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dan tanggal 21 Desember dilaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja dan Manajemen Keuangan yang melibatkan narasumber dari Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan KPKNL Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket control*.

Sistem pengawasan premarket dan post market telah lama dilaksanakan, dengan tersedianya aplikasi seperti Cek Badan POM, BPOM Mobile, Halo BPOM Mobile, BPOM Public Warning, yang memudahkan staf Bidang Infokom dalam mensosialisasikan aplikasi-aplikasi tersebut baik dalam kegiatan Pameran, kegiatan KIE, kegiatan CFD, bahkan kegiatan Penyebaran Informasi dan sosialisasi lainnya dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan untuk postmarket control. Disamping itu Pengawasan Premarket juga berupa pelayanan publik berbayar dalam kaitannya dengan penerbitan SKI/SKE dan pengujian sampel pihak ketiga dalam rangka perijinan MD, TR dan Notifikasi Kosmetik sejalan dengan Peraturan Badan POM No.27 tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Publik di Lingkungan Badan

POM RI. Sementara pengawasan Post Market, lebih fokus terhadap kegiatan rutinitas bidang Pemeriksaan dengan mempertajam pengawasan di saranaproduksi, distribusi, dan pelayanan melalui sampling dan hasil uji serta pengawasan iklan dan label. BBPOM di Makassar juga lebih pro aktif untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga dapat diketahui seberapa besar peran aktif instansi terkait dalam hal ini dinas kesehatan setempat dan kementerian kesehatan melaksanakan tindak lanjut yang di rekomendasikan oleh BBPOM di Makassar dari hasil pengawasannya.

4. Optimalisasi sistem teknologi dan informasi sebagai sarana komunikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkini terkait hasil pengawasan dan pelayanan publik di Balai Besar POM di Makassar

Sebagai implementasi UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, inovasi teknologi Informasi berupa aplikasi seperti Cek Badan POM, BPOM Mobile, Halo BPOM Mobile, BPOM Public Warning, Website resmi Badan POM dan BBPOM di Makassar, serta media social lainnya (whatsapp, facebook, Instagram, youtube, sms blast dll) semakin mempermudah akses masyarakat umum terhadap informasi Obat dan Makanan termasuk hasil pengawasan dan ruang lingkup pelayanan publik di BBPOM di Makassar. Dalam rangka optimalisasi, media social dan website resmi Badan POM sangat efektif dan efisien untuk berkomunikasi tentang persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan,

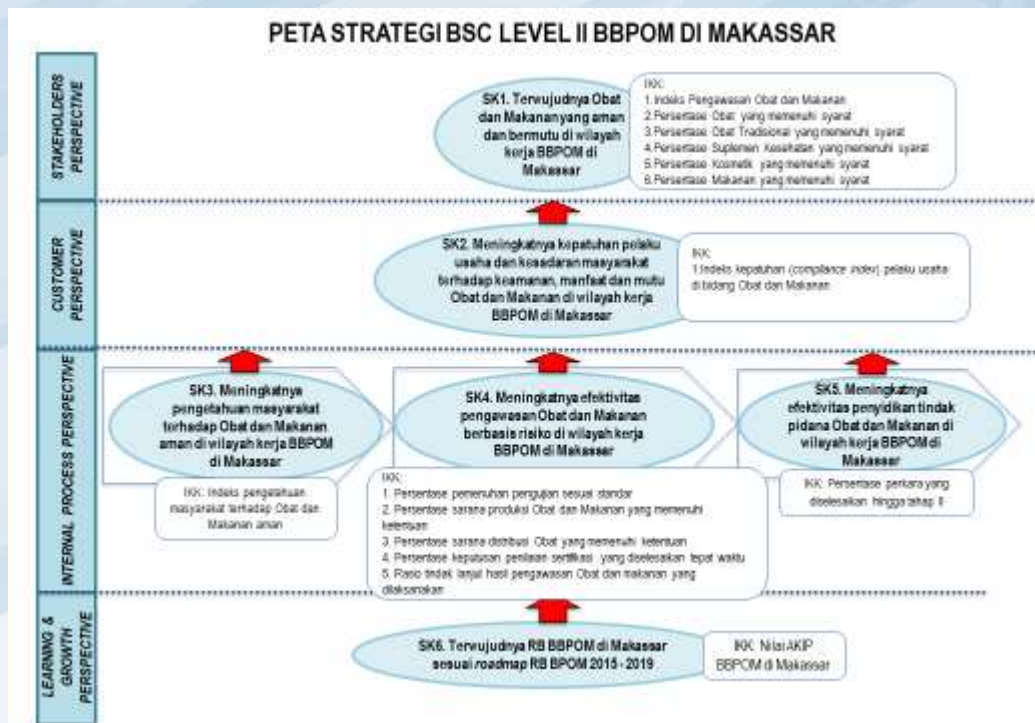
5. Penerapan *cascading* pada setiap tahapan kegiatan mulai dari Sasaran Strategis Organisasi sampai level individu.

Penerapan *cascading* (proses pendelegasian) di level individu, dalam setiap tahapan kegiatan adalah merupakan konsep Balanced Scorecard (BSC), dengan tahapan Peta Strategi, Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama, Target, Inisiatif Strategis, Definisi Operasional hingga *Cascading*. Penerapan *Cascading* bertujuan adanya perubahan yang lebih spesifik, terukur, jelas waktunya dan tidak multitafsir.

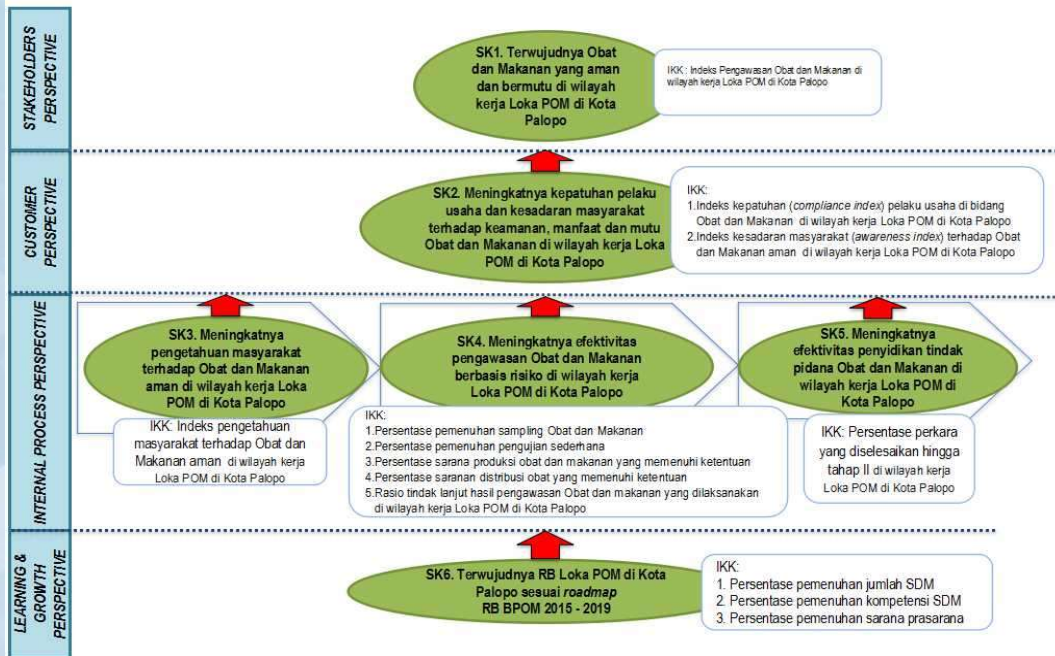
SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Makassar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) diharapkan Balai Besar POM di Makassar akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Kepala Balai Besar POM di Makassar berikut ini:

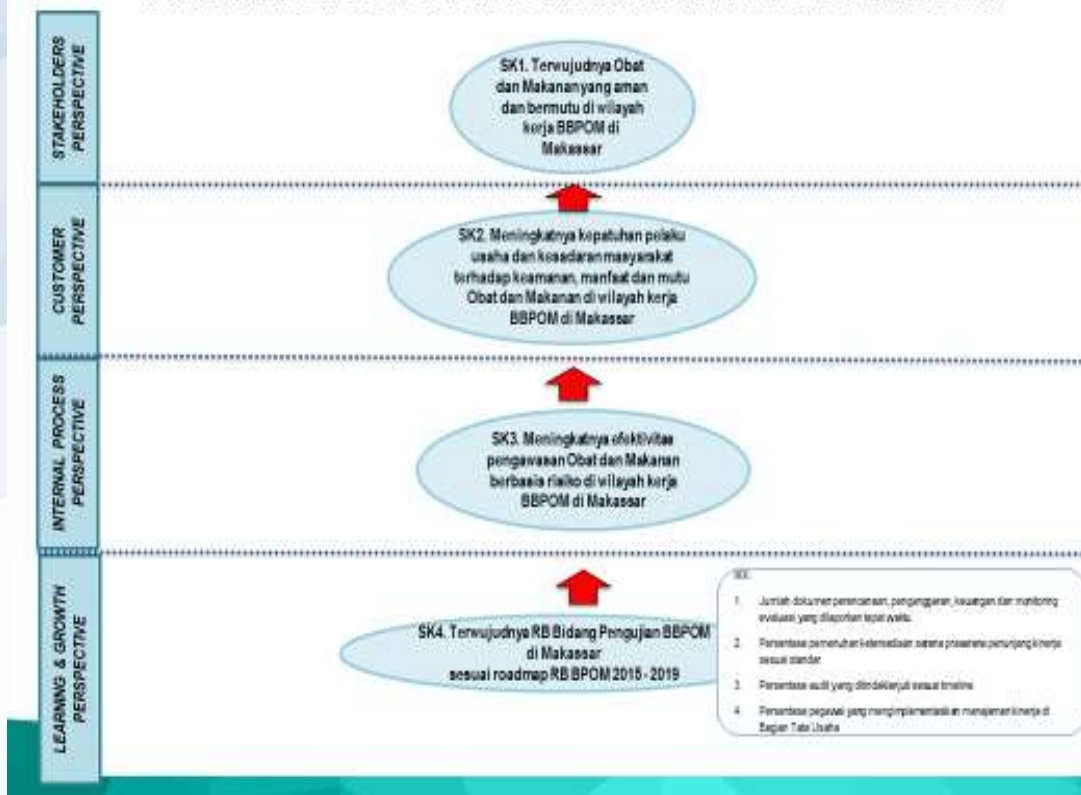
Gambar 3.37 Peta Strategi BSC Level II - IV



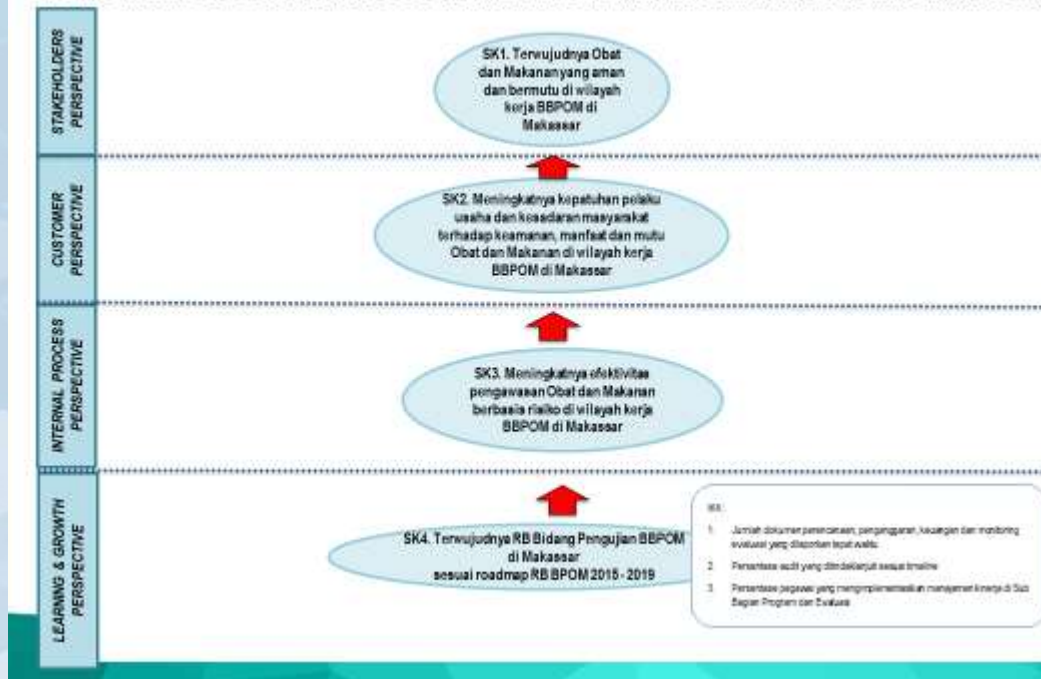
PETA STRATEGI BSC LEVEL II LOKA POM di KOTA PALOPO



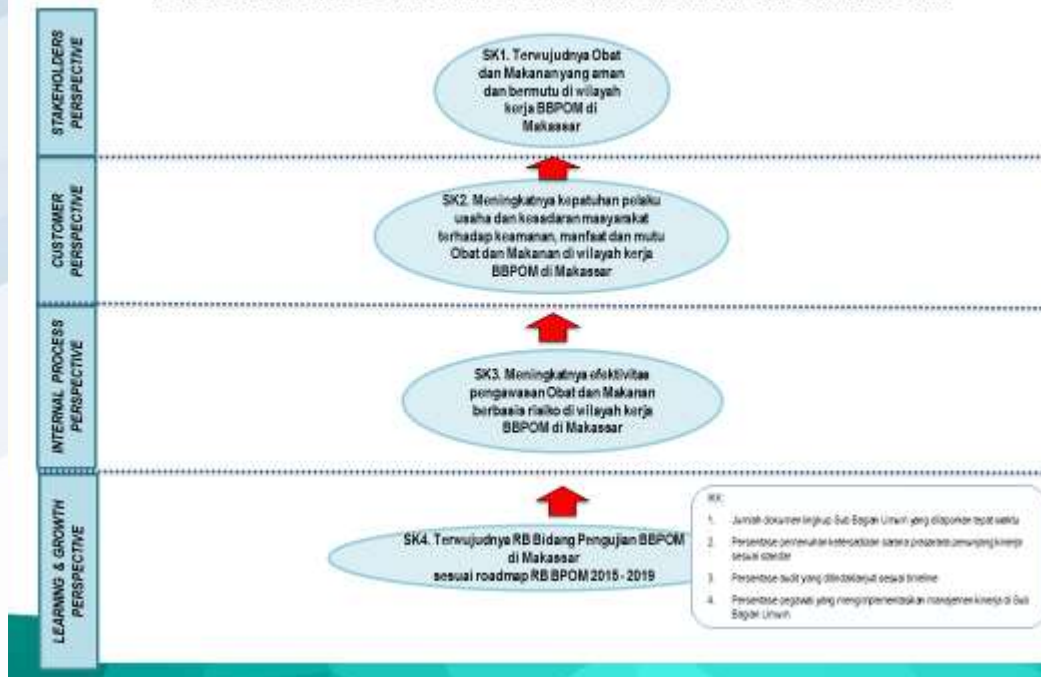
PETA STRATEGI BSC LEVEL III BAGIAN TATA USAHA BBPOM DI MAKASSAR.



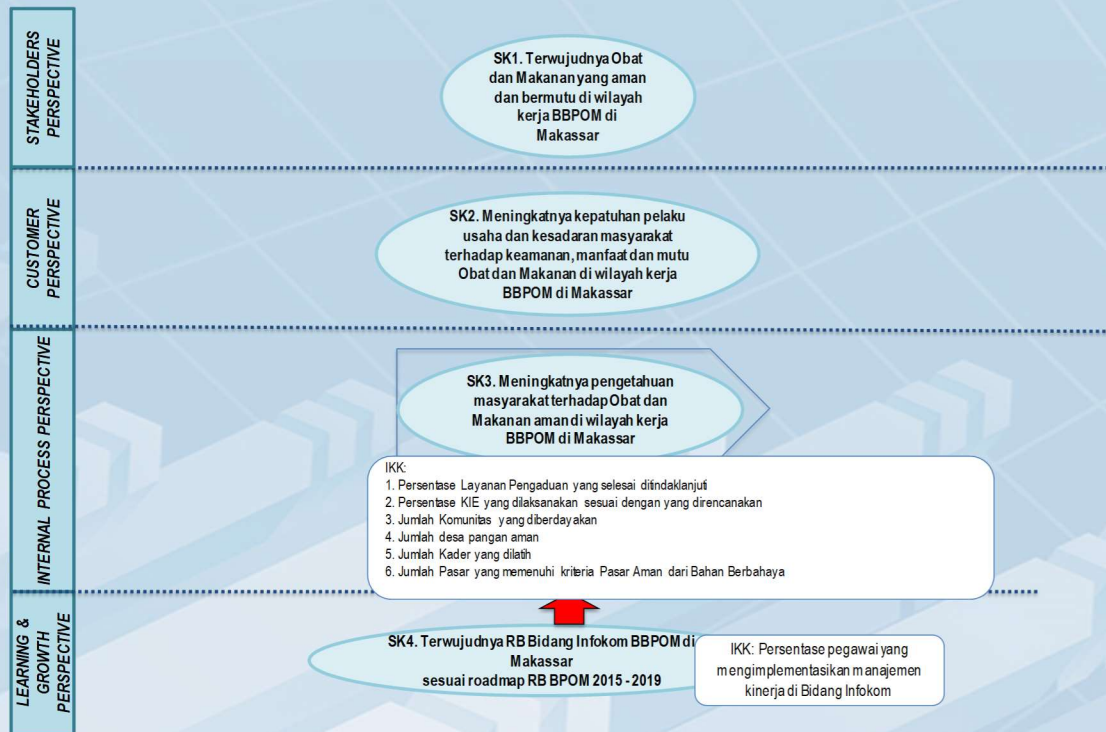
PETA STRATEGI BSC LEVEL IV SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI BBPOM DI MAKASSAR



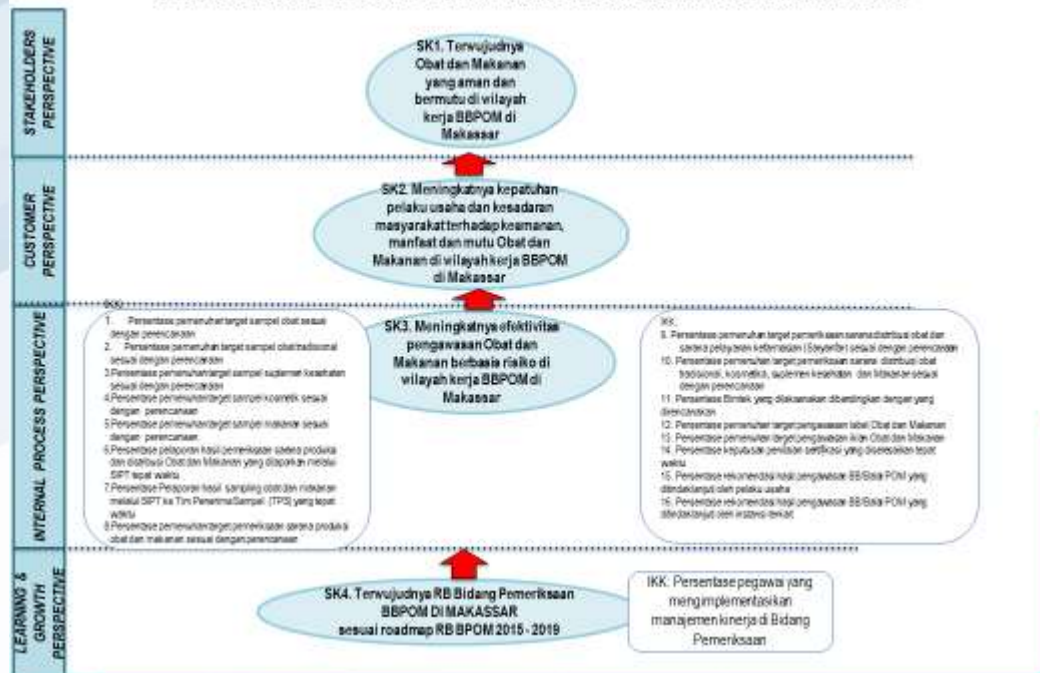
PETA STRATEGI BSC LEVEL IV SUB BAGIAN UMUM BBPOM DI MAKASSAR.



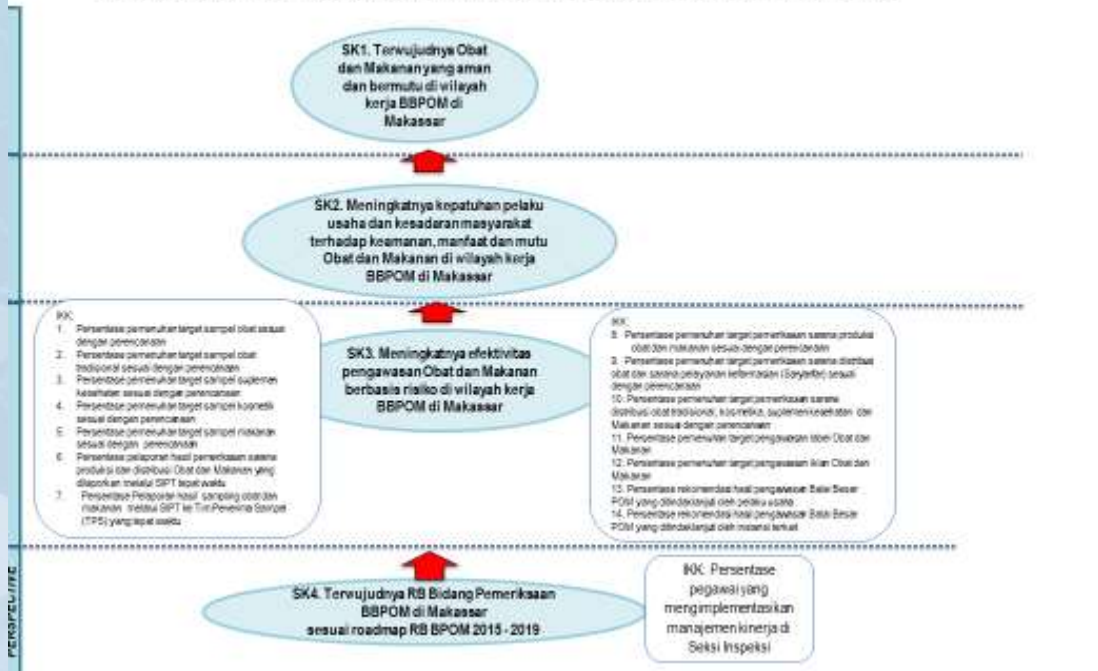
PETA STRATEGI BSC LEVEL III BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI BBPOM DI MAKASSAR



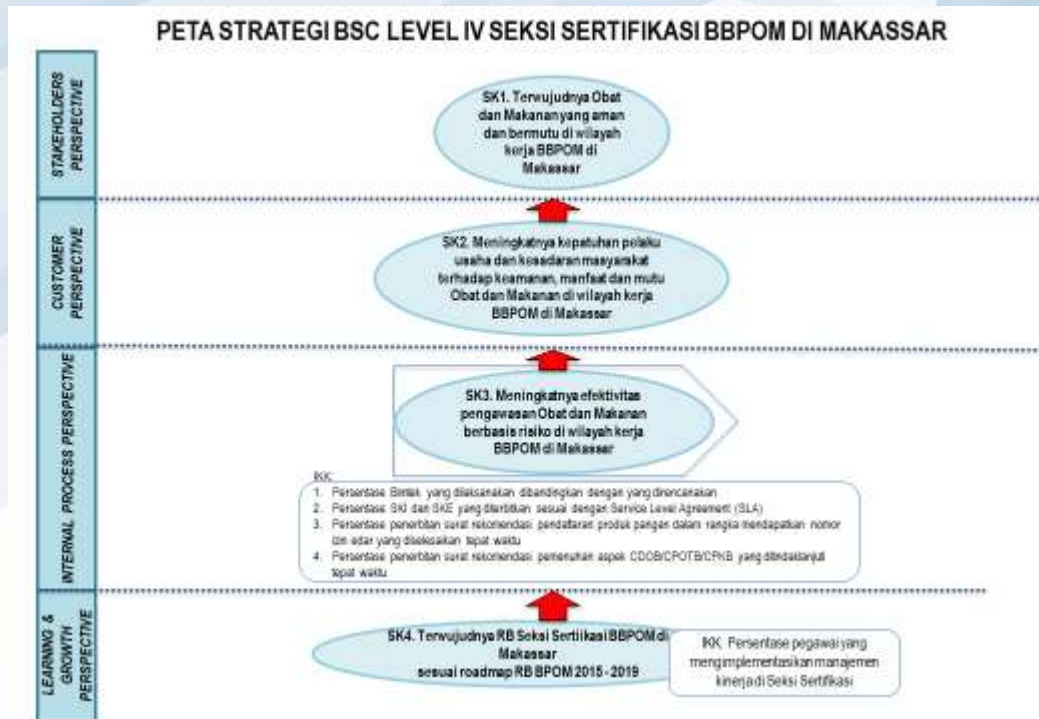
PETA STRATEGI BSC LEVEL III BIDANG PEMERIKSAAN DI MAKASSAR



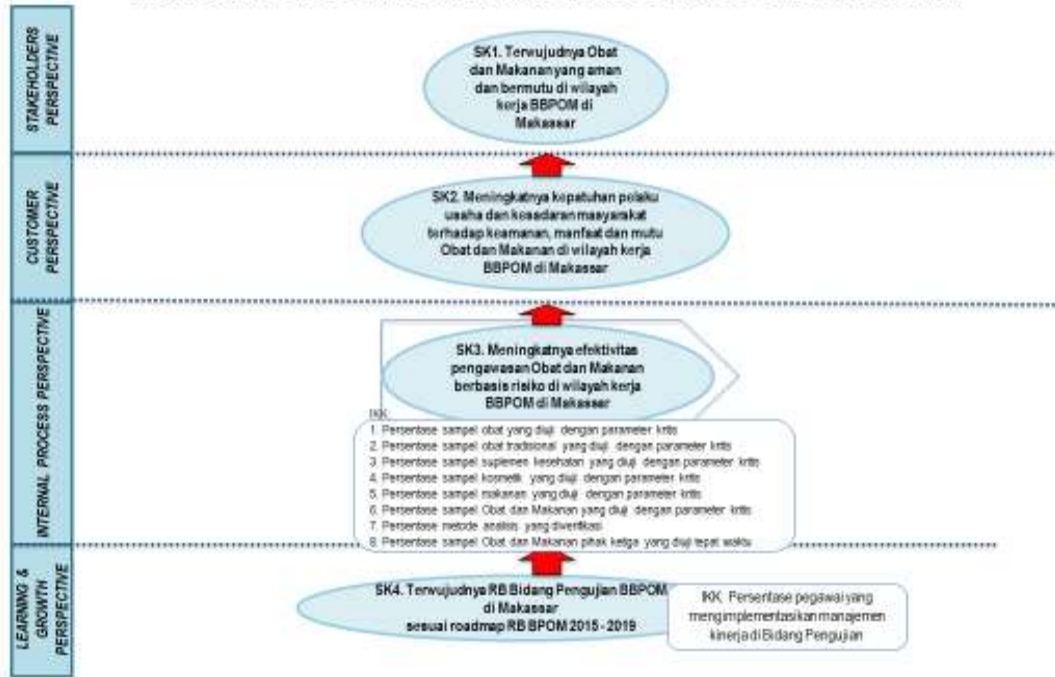
PETA STRATEGI BSC LEVEL IV SEKSI INSPEKSI BBPOM DI MAKASSAR



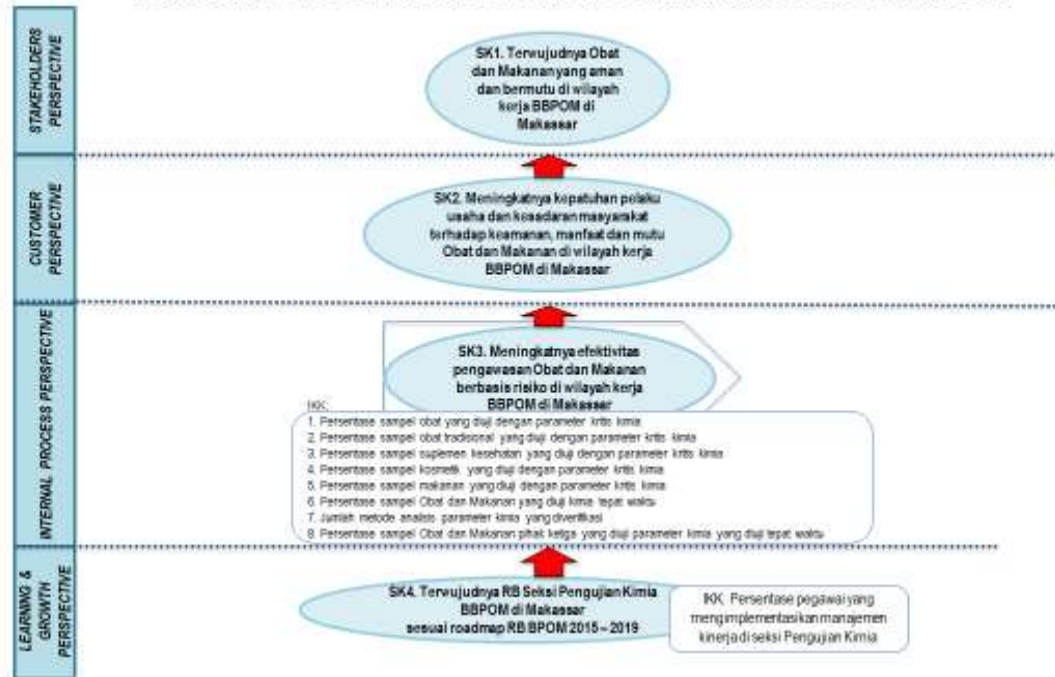
PETA STRATEGI BSC LEVEL IV SEKSI SERTIFIKASI BBPOM DI MAKASSAR



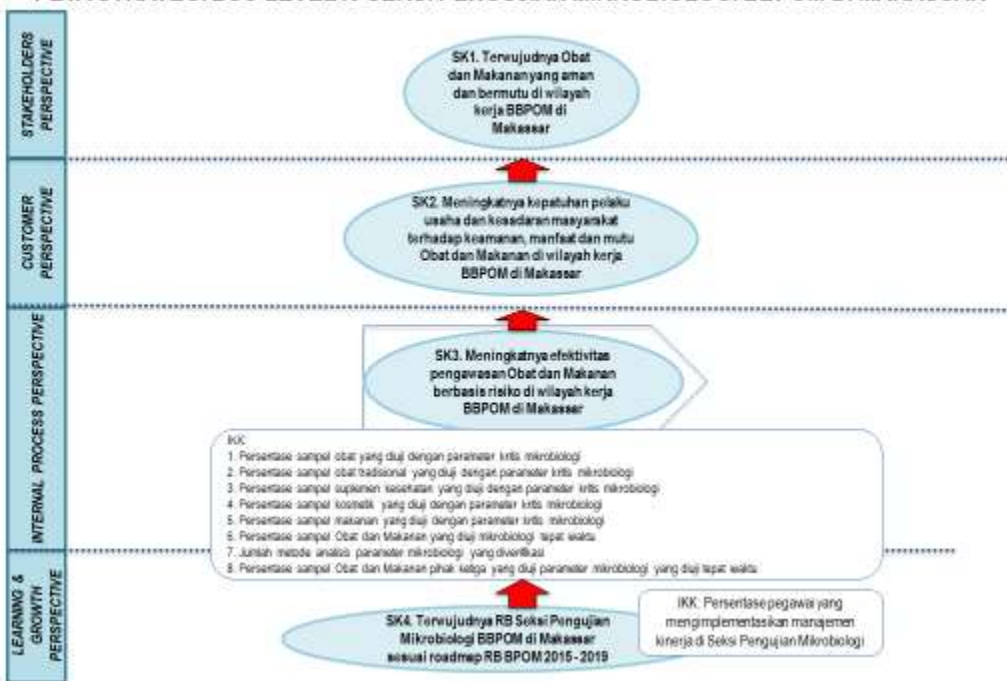
PETA STRATEGI BSC LEVEL III BIDANG PENGUJIAN BBPOM DI MAKASSAR



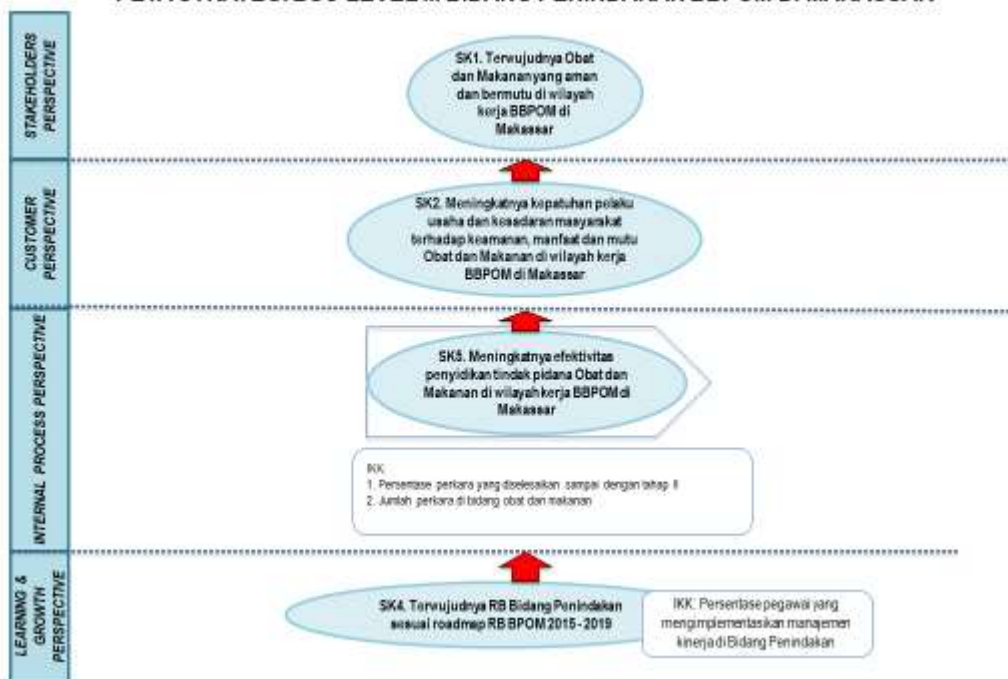
PETA STRATEGI BSC LEVEL IV SEKSI PENGUJIAN KIMIA BBPOM DI MAKASSAR



PETA STRATEGI BSC LEVEL IV SEKSI PENGUJIAN MIKROBIOLOGI BBPOM DI MAKASSAR



PETA STRATEGI BSC LEVEL III BIDANG PENINDAKAN BBPOM DI MAKASSAR



Penerapan Metode Cascading di level individu, akan disesuaikan dengan peta strategi level IV.

6. Pola sampling disesuaikan dengan perencanaan tahunan dan bulanan.
Pola sampling setiap tahun diupayakan sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan. Meskipun dalam proses pelaksanaannya banyak kendala, tetapi untuk tahun 2018, kendala terbesar adalah timeline hasil uji sampel yang carry over hingga tahun berakhir, belum sempurnanya proses upgrade aplikasi SIPT untuk versi terbaru, renovasi laboratorium, pemindahan peralatan laboratorium ke ruangan lain, yang mengakibatkan alat tersebut tidak dapat berfungsi optimal.

7. Optimalisasi advokasi dengan lintas sektor yang menghasilkan nota kesepahaman sesuai amanat Instruksi Presiden.
Tahun 2018, nota kesepahaman banyak dilakukan antara BBPOM di Makassar dengan 80 sekolah SD se Kota Makassar, yang di koordinir oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Demikian juga adanya penandatanganan komitmen membentuk kantin sekolah sehat untuk 19 SD, SMP bersama-sama dengan Bupati Kab Takalar dan anggota Komisi IX DPR RI.

3.3 Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2017, Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 adalah sebesar Rp. Rp. 57.553.452.000,-. Namun terdapat revisi DIPA dalam rangka Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota dari 2 Kab Menjadi 1 Kab yaitu LOKA Palopo sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 57.380.795.000,-.

Realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 50,618.525.526.000,- atau 88,215 %. Terjadi penurunan realisasi anggaran tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 .

Tabel 3.51

Rincian realisasi anggaran BBPOM di Makassar Tahun Anggaran 2018

	<i>Jenis Belanja</i>			<i>Total</i>
	<i>Pegawai</i>	<i>Barang</i>	<i>Modal</i>	
PAGU	17.908.894.000	26.643.951.000	12.827.950.000	57.380.795.000
REALISASI	17.066.359.651	21.301.127.010	12.251.038.865	50.618.525.526
PERSENTASE	(95.30%)	(79.95%)	(95.50%)	(88.22%)
SISA	842.534.349	5.342.823.990	576.911.135	6.762.269.474

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja

Revisi DIPA IV adalah salah satu cara efisiensi penggunaan anggaran, dimana terjadi beberapa perubahan dalam rangka optimalisasi anggaran. Salah satunya dengan mengurangi alokasi anggaran pada sub komponen pemeriksaan sarana distribusi yang tidak dapat direalisasikan pada output pengawasan sarana distribusi menjadi kegiatan FGD Sosialisasi Inpres No 3 tahun 2017 dan Permendagri No 41 tahun 2018 dengan melibatkan instansi antara lain : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Sekda Kabupaten se provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Kab / Kota se provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini untuk memenuhi target Sasaran kegiatan 4 Internal Process Perspective pada

indikator kinerja kegiatan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan terpenuhinya sarana produksi, distribusi dan pelayanan yang memenuhi ketentuan. Dengan adanya sosialisasi ini, akan sangat membantu jika pemda setempat melalui Bappeda menganggarkan kegiatan pengawasan di instansi 9 kementerian lembaga se-provinsi Sulawesi Selatan sesuai amanat Inpres No. 3 Tahun 2017.

Pada output sarana prasarana terdiri dari pembelian genset beserta instalasinya dan renovasi gedung serapan anggaran tidak efisien disebabkan antara lain:

- Pada pengadaan genset spesifikasi tidak mencakup instalasi genset, sehingga alokasi anggaran instalasi genset tidak terserap.
- Pemanfaatan eks gedung Kanwil yang telah dihibahkan ke BBPOM di Makassar, dalam rangka pembangunan pagar hanya terealisasi 73,94% dalam segi serapan anggarannya

Alokasi anggaran ke Loka POM di bulan September 2018 sejatinya diperuntukkan untuk 2 Loka POM, namun pada kenyataannya hanya 1 Loka POM yang terbentuk dalam waktu 4 bulan dan dengan jumlah SDM yang kompetensinya terbatas, realisasi anggaran 35,55%. Disamping itu, dalam output yang sama juga dititipkan alokasi anggaran untuk Tunjangan Kinerja selama setahun, namun tidak direalisasikan.

Tabel 3.52

Alokasi dan Realisasi anggaran berdasarkan sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	2.405.495.000,00	2.203.168.520,00	91,59
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	436.594.000,00	399.239.000,00	91,44
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6.068.064.000,00	5.424.468.708,00	89,39
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	5.452.486.000,00	4.672.215.953,00	85,69
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1.417.488.000,00	962.588.723,00	67,91
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	41.600.668.000,00	36.956.844.622,00	88,84

Tabel 3.53

Alokasi dan Realisasi anggaran berdasarkan Indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	2.405.495.000	2.203.168.520	91,59
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilan	436.594.000	399.239.000	91,44
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	4.845.367.000	4.468.331.373	92,22
		Komunitas yang diberdayakan	1.222.697.000	956.137.335	78,20
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	3.150.000.000	2.650.217.107	84,13
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	330.842.000	294.150.510	88,91
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	1.971.644.000	1.727.848.336	87,63
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Penyidikan obat dan makanan	1.417.488.000	962.588.723	67,91
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	2.459.221.000	2.246.209.227	91,34
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	24.911.386.000	23.285.741.485	93,47
		Pengadaan Alat Laboratorium	10.049.600.000	9.938.620.250	98,90
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	4.180.461.000	1.486.273.660	35,55

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran antara lain karena rendahnya persentase capaian indikator kinerja Jumlah Penyidikan obat dan makanan sebesar 67,91% dari Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, disebabkan karena komponen penganggaran untuk output ini mencakup secara keseluruhan sampai pada tahap pemanggilan saksi dan ahli dalam proses persidangan, sedangkan dalam definisi operasional perkara yang dihitung adalah hanya perkara yang telah diterbitkan SPDPnya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sesuai yang direkomendasikan oleh Inspektorat Badan POM sebagai berikut :

1. Memaksimalkan manfaat monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala di semua level unit kerja Balai Besar POM di Makassar
2. Melakukan reviu terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang memberikan daya ungkit terhadap pencapaian kinerja Balai Besar POM di Makassar.

3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 3.54 Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	IE	SE	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	0,89	1	TIDAK EFISIEN
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	1,09	1	EFISIEN
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1,13	1	EFISIEN
		Komunitas yang diberdayakan	1,28	1	EFISIEN
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	1,19	1	EFISIEN
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	1,36	1	EFISIEN
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	1,24	1	EFISIEN
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Penyidikan obat dan makanan	1,47	1	EFISIEN
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1,09	1	EFISIEN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	1,07	1	EFISIEN
		Pengadaan Alat Laboratorium	1,01	1	EFISIEN
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	2,81	1	EFISIEN

Pada tahun 2018, dari 12 kegiatan utama yang mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar kegiatan yang tidak efisien yaitu Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,01 sampai 1,81. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kotamempunyai TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.



Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja BBPOM di Makassar tahun 2018 sebesar 88,87 atau kategori Baik, menurun dari capaian tahun 2017 89,38 atau sebanyak 0,51 poin salah satu faktor penyebab turunnya capaian pada tahun 2018 adalah pada output Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota capaian realisasi keuangan hanya 35,55 %, karena tidak terserapnya anggaran kenaikan tunjangan kinerja 80%. Nilai kinerja pada aplikasi monev ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil.

Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan



aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM di Makassar Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Renstra BPOM Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2018 dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai 6 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan ", Nilai Pencapaian Sasaran 108,50 %, dengan kriteria memuaskan
2. Sasaran strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat", Nilai Pencapaian Sasaran 98,72 %, dengan kriteria cukup
3. Sasaran strategis "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar ", Nilai Pencapaian Sasaran 115,43 %, dengan kriteria memuaskan

4. Sasaranstrategis“ Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan “, Nilai pencapaian 100,48 % dengan criteria memuaskan
5. Sasaran strategis“ Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar “, Nila pencapaian sasaran 128,56 % dengan criteria tidak dapat disimpulkan
6. Sasaran strategis “ Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 “,Nilai pencapaian sasaran 94,58 % dengan criteria cukup

Realisasi anggaran pada tahun 2018 berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa dari 15 kegiatan pendukung yang dilaksanakan, semua kegiatan memperlihatkan nilai efisiensi yang positif. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Makassar adalah **88,22%** yaitu sebesar **Rp50,618,525,526.00** dari total Pagu DIPA sebesar **Rp57,380,795,000.00**

4.1. Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja 2018

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan konsisten agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara efisien.
2. Melakukan peningkatan pengawasan pada produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat
3. Melakukan review dan penyesuaian target pada Renstra maupun dokumen perencanaan lainnya untuk tahun 2019-2020 berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2018.

4. Melakukan perencanaan tindak lanjut terhadap pencapaian sampel selesai uji tepat waktu

Rencana Perbaikan

- Pengetahuan terhadap seluruh Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan masih dalam rentang *cukup baik*, sehingga untuk meningkatkan nilai indeks di tahun depan, Badan POM harus berupaya lebih keras dan bersinergi dengan bagian hubungan masyarakat untuk lebih mendorong *awareness* masyarakat terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dengan obat dan makanan.
- Untuk meningkatkan pengetahuan terkait izin edar, BPOM perlu menyeragamkan semua kode izin edar produk obat dan makanan yang ada di pasaran. Penyeragaman kode izin edar dapat dilakukan dengan menambahkan kata 'BPOM' sebelum nomor registrasi BPOM.
- Penyuluhan dan sosialisasi terkait obat dan makanan dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan. Lokasi sosialisasi/penyuluhan dapat diprioritaskan di regional Maluku & Papua, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan usia yang semakin dewasa.
- Upaya untuk mendorong *awareness* masyarakat terhadap jenis-jenis obat dan makanan dan produk berbahaya yang beredar di pasaran dapat dilakukan melalui penyebaran informasi di media konvensional seperti televisi, *billboard*, dll.
- Media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dapat menjadi alternatif penyebaran informasi yang cukup efektif. Pengemasan informasi, berita, maupun iklan di media sosial perlu diperhatikan. Penggunaan infografis dapat menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut obat dan makanan.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI Makassar TAHUN 2015-2017 (OTK Lama)
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI Makassar 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Balai Besar POM di Makassar									
	SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				5.243	5.768	6.345	BBPOM di Makassar
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	92.00	92.50	93.00			
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	80.00	81.00	82.00			
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	89.00	90.00	91.00			
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	79.00	80.00	81.00			
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	80.00	80.00	81.00			
	SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				1.850	1.870	1.930	BBPOM di Makassar
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Selatan	65.00	65.00	70.00			
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	3.00	3.00	4.00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Makassar					25.431	27.974	30.772	BBPOM di Makassar
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Makassar	Provinsi Jawa Timur	B	A	A				
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
	SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					5.24	5.77	6.35	BBPOM di Makassar
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	92.00	92.50	93.00				
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	80.00	81.00	82.00				
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	89.00	90.00	91.00				
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	79.00	80.00	81.00				
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Selatan	80.00	80.00	81.00				
	SP 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					1.85	1.87	1.93	BBPOM di Makassar
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Selatan	65.00	65.00	70.00				
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	3	3	4				
	SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Makassar					25.43	27.97	30.77	BBPOM di Makassar
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan	B	A	A				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Makassar							32.52	35.61	39.05	BBPOM di Makassar
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia									
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sulawesi Selatan	4,300	4,300	4,300				
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sulawesi Selatan	100	100	100				
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	13.39	14.03	14.67				
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	30.77	31.08	31.38				
	5	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Provinsi Sulawesi Selatan	14	14	14				
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Sulawesi Selatan	678	678	746				
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sulawesi Selatan	22	23	23				
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Selatan	81	82	84				
	9	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sulawesi Selatan	10	9	10				

LAMPIRAN 2

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Makassar
Revisi Renstra BPOM 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Milyar)		Unit Organisasi Pelaksana	
			2018 (OTK Baru)	2019	2018	2019		
Badan Pengawas Obat dan Makanan								
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan						
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Sulawesi Selatan	70	71	-	BBPOM di Makassar	
	1.2.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	97,8%	94%	0,375	0,384	BBPOM di Makassar
	1.3.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	91%	65%	0,330	0,337	BBPOM di Makassar
	1.4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	98%	80%	0,675	0,690	BBPOM di Makassar
	1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	98%	87%	0,120	0,123	BBPOM di Makassar
	1.6.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	89%	72%	0,904	0,923	BBPOM di Makassar
	SS 2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar						
	2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	Sulawesi Selatan	60	61	-	-	BBPOM di Makassar
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	Sulawesi Selatan	-	66	-	-	BBPOM di Makassar

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Milyar)		Unit Organisasi Pelaksana
			2018 (OTK Baru)	2019	2018	2019	
	SS 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar						
	3.1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Sulawesi Selatan	60.00	61.00	-	-	BBPOM di Makassar
	SS 4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan						
	4.1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Sulawesi Selatan	100	100			BBPOM di Makassar
	4.2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Sulawesi Selatan	15,31	55	0,330	0,581	
	4.3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Sulawesi Selatan	31,69	70	2,397	2,652	
	4.4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sulawesi Selatan	-	83%	-	0,892	
	4.5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Sulawesi Selatan	-	50	-	0,631	
	SS 5 Meningkatnya Efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar						
	5.1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Sulawesi Selatan	-	50%	-	-	BBPOM di Makassar
	SS 6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019						
	6.1. Nilai AKIP BBPOM di Makassar	Sulawesi Selatan	78	81	-	-	BBPOM di Makassar

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Milyar)		Unit Organisasi Pelaksana
			2018 (OTK Baru)	2019	2018	2019	
Program Pengawasan Obat dan Makanan							BBPOM di Makassar
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar							BBPOM di Makassar
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia						
1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Sulawesi Selatan	14	16	1,200	1,283	
2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sulawesi Selatan	4307	4109	0,905	1,535	
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Sulawesi Selatan	15,31	55	0,330	0,581	
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Sulawesi Selatan	31,69	70	2,397	2,652	
5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Sulawesi Selatan	820	56	4,845	3,555	
6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Sulawesi Selatan	24	-	1,223	-	
7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Sulawesi Selatan	86	87	34,675	8,876	
8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Sulawesi Selatan	10	10	2,459	2,161	
9	Persentase obat yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	93,5%	94%	0,375	0,384	
10	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	83%	65%	0,330	0,337	
11	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	92%	80%	0,675	0,690	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (Milyar)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018 (OTK Baru)	2019	2018	2019	
	12	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	82%	87%	0,120	0,123	
	13	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Sulawesi Selatan	90%	72%	0,904	0,923	
	14	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Sulawesi Selatan	100%	100%			
	15	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Sulawesi Selatan	15,31 %	55%	0,330	0,581	
	16	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Sulawesi Selatan	31,69 %	70%	1,455	1,671	
	17	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sulawesi Selatan	-	83%	-	0,892	
	18	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Sulawesi Selatan	-	50	-	0,631	
	19	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Sulawesi Selatan	-	50%	-		
	20	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Sulawesi Selatan	-	61	-	-	
	21	Nilai AKIP Balai	Sulawesi Selatan	78	81	-	-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Hanetje Gustaf Kakerissa, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

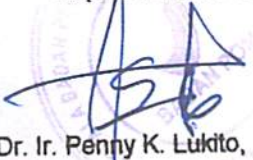
Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan POM


Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 15 Februari 2018
Pihak Pertama

Drs. Hanetje Gustaf Kakerissa, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BB/BPOM DI MAKASSAR

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.80
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	91.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.00
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85.00
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5.00
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	3017
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1290
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15,30
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	31,69
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	31,69
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	14
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	820
		Komunitas yang diberdayakan	24
		Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)*	-

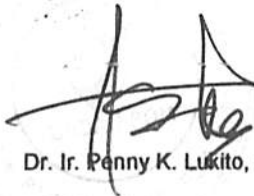
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	86
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar

Anggaran :
Rp 57.553.452.000

Jakarta, 15 Februari 2018

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala BBPOM di Makassar



Drs. Hanafje Gustaf Kakerissa, Apt

Keterangan

(*) Indikator ini hanya berlaku untuk 10 BB/BPOM berikut :

1. BBPOM di Bandung
2. BBPOM di Semarang
3. BBPOM di Yogyakarta
4. BBPOM di Surabaya
5. BBPOM di Banda Aceh
6. BBPOM di Medan
7. BPOM di Kendari
8. BPOM di Serang
9. BPOM di Gorontalo
10. BPOM di Manokwari

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.80	97.80	97.80	97.80	97.80				
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00				
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00				
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00				
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	1	2	3	5				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A	-	-	-	A				
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	3017	676	938	861	455				
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1290	150	586	1009	1290				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15,30	2,61	7,65	12,24	15,30				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	31,69	6,48	17,21	26,05	31,69				
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	31,69	6,70	16,96	23,97	31,69				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (kumulatif)					REALISASI (kumulatif)					
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12			
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	14	3	7	11	14							
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat														
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	820	205	410	615	820							
		Komunitas yang diberdayakan	24	23	23	23	24							
		Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)*	-	-	-	-	-							
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan														
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00							
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	5	7	9							



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2018

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama

Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BBPOM DI MAKASSAR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	93,5 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	83 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	92 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	82%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	90 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60
		Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risikodi Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan	75
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	38
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	78

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Rp 57.380.795,000

Jakarta, 1 Oktober 2018

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P)

Pihak Pertama

(Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si)

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI MAKASSAR TAHUN 2018**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI					
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan				70						
			Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5	93,5	93,5	93,5						
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83	83	83	83						
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92	92	92	92						
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82	82	82	82						
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90	90	90	90						
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	60	60	60						
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	-						
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	60	60	60						

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sulawesi Selatan	12,50	25,00	35,00	100					
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15,00	32,00	48,00	65,00					
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	20,00	43,00	62,00	75,00					
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	8,50	17,00	27,00	38,00					
			Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	10,00	25,00	35,00	50,00					
4	Learning and Growth	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar	-	-	-	78,00					

Jakarta, 1 Oktober 2018
Kepala Balai POM di Makassar,

Kepala Badan POM,




Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si.

LAMPIRAN 4.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
BBPOM DI MAKASSAR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4307
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15.3
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31.68
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	820
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	24
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	93.5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	83
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	82
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	90
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan	100
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		50	
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		65	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan		75	
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		38	
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	78

LAMPIRAN 5

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
BBPOM DI MAKASSAR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
RENJA 2018 (OTK Lama)					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4307	3530	81.96
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	15.3	18.23	119
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31.68	33.14	104.61
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	14	14	100.00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86	84.17	97.87
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	820	855	104.27
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	24	24	100.00
PETA STRATEGI (OTK Baru)					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	70	72.8	104.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	93.5	100.00	106.95
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	83	90.20	108.67
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	92	99.72	108.39
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	82	99.01	120.74
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Selatan	90	92.05	102.28
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60	59.23	98.72
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	60	69.26	115.43

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Selatan	100	81.96	81.96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50	32.16	64.32
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	65	39.66	61.02
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan	75	86.30	115.07
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	38	68.42	180.05
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Makassar	50	64.28	128.56
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	78	73.77	94.58

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran

Rp. 57.380.795.000

Rp. 57.380.795.000

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
BBPOM DI MAKASSAR**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
RENJA 2018 (OTK Lama)							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	5,555,495,000	4,853,385,627	87.36
			Output : Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	4307	3530	81.96
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	330,842,000	294,150,510	88.91
			Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	120	143	119.17
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	2,408,238,000	2,127,087,336	88.33
			Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	1,562	1,605	102.75
4	Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	1,417,488,000	962,588,723	67.91
			Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	14	14	100.00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	2,005,882,000	1,613,244,790	80.43
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100.00
		Pengadaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp	10,049,600,000	9,938,620,250	98.90
			Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	unit	59	59	100.00
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	Input : Dana	Rp	2,459,221,000	2,246,209,227	91.34

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	waktu	dan Evaluasi	Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	10	10	100.00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	4,845,367,000	4,468,331,373	92.22
			Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	820	855	104.27
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp	1,222,697,000	956,137,335	78.20
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	komunitas	24	24	100.00
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	-	-	-
			Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	-	-	-
PETA STRATEGI (OTK Baru)							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	2,405,495,000	2,203,168,520	91.59
			Output : Jumlah Sampel yang di periksa	Sampel	4307	3530	81.96
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilan	Input : Dana	Rp	436,594,000	399,239,000	91.44
			Output : Jumlah sarana yang diaudit dan dibina	Sarana	73	73	100.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	4,845,367,000	4,468,331,373	92.22
			Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	820	855	104.27
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp	1,222,697,000	956,137,335	78.20

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	komunitas	24	24	100.00		
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	-	-	-		
			Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	-	-	-		
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	Input : Dana	Rp	3,150,000,000	2,650,217,107	84.13		
			Output : Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	Dokumen	1	1	100.00		
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	330,842,000	294,150,510	88.91		
			Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	120	145	120.83		
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	1,971,644,000	1,727,848,336	87.63		
			Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	1,562	1,693	108.39		
		5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	1,417,488,000	962,588,723	67.91
					Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	14	14	100.00
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	2,459,221,000	2,246,209,227	91.34		
			Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	10	10	100.00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	24,911,386,000	23,285,741,485	93.47		

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100.00
		Pengadaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp	10,049,600,000	9,938,620,250	98.90
			Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	unit	59	59	100.00
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp	4,180,461,000	1,486,273,660	35.55
			Output : Jumlah kab/kota	kab/kota	1	1	100.00

Lampiran 7

**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
RENJA 2018 (OTK Lama)								
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	87.36	81.96	0.94	1	TIDAK EFISIEN	(0.06)
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	88.91	119.17	1.34	1	EFISIEN	0.34
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	88.33	102.75	1.16	1	EFISIEN	0.16
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Penyidikan obat dan makanan	67.91	100.00	1.47	1	EFISIEN	0.47
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	80.43	100.00	1.24	1	EFISIEN	0.24
		Pengadaan Alat Laboratorium	98.90	100.00	1.01	1	EFISIEN	0.01
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	91.34	100.00	1.09	1	EFISIEN	0.09

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	92.22	104.27	1.13	1	EFISIEN	0.13
		Komunitas yang diberdayakan	78.20	100.00	1.28	1	EFISIEN	0.28
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-	-	-	-	-	-
PETA STRATEGI (OTK Baru)								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Selatan	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	91.59	81.96	0.89	1	TIDAK EFISIEN	(0.11)
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	91.44	100.00	1.09	1	EFISIEN	0.09
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	92.22	104.27	1.13	1	EFISIEN	0.13
		Komunitas yang diberdayakan	78.20	100.00	1.28	1	EFISIEN	0.28
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Selatan	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	84.13	100.00	1.19	1	EFISIEN	0.19
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan	88.91	120.83	1.36	1	EFISIEN	0.36

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	87.63	108.39	1.24	1	EFISIEN	0.24
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Penyidikan obat dan makanan	67.91	100.00	1.47	1	EFISIEN	0.47
6	Terwujudnya RB BBPOM di Makassar sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	91.34	100.00	1.09	1	EFISIEN	0.09
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	93.47	100.00	1.07	1	EFISIEN	0.07
		Pengadaan Alat Laboratorium	98.90	100.00	1.01	1	EFISIEN	0.01
		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	35.55	100.00	2.81	1	EFISIEN	1.81

LAPKIN

BALAI BESAR

POM



BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

NA-DFC

The National Agency of Drug and Food Control

Jl. Baji Minasa No. 2, Makassar (Kode Pos 90126)

Telp. (0411) 871115; Fax. (0411) 873496; e-mail : ulpkmks@yahoo.com

DI MAKASSAR

2018